



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN PARTI ISLAM SE-MALAYSIA DALAM UPAYA
PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI KELANTAN
1978-1990**

SKRIPSI

**ANDI ARIF ADI MULYA
NPM: 0606086810**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
Juli 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN PARTI ISLAM SE-MALAYSIA DALAM UPAYA
PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI KELANTAN
1978-1990**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

**ANDI ARIF ADI MULYA
NPM: 0606086810**

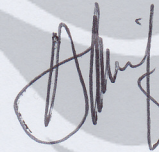
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
Juli 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 14 Juli 2011



Andi Arif Adi Mulya

HALAMAN PERNYATAAN ORSINIALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Andi Arif Adi Mulya

NPM : 0606086810

Tanda tangan:

Tanggal : 14 Juli 2011

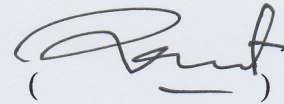
HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Andi Arif Adi Mulya
NPM : 0606086810
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul Skripsi : Peran Partai Islam Se-Malaysia Dalam Upaya Penegakan Syariat Islam Di Kelantan 1978-1990

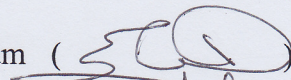
Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua/ Penguji : Abdurakhman, M.Hum.



Pembimbing/ Penguji : Dr. Muhammad Iskandar, M.Hum



Penguji : Linda Sunarti, M.Hum



Panitera : Didik Pradjoko, M.Hum



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2011

oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta
NIP 19651023 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mengaugerahkan begitu banyak nikmatnya kepada saya sehingga saya pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang telah dua tahun saya kerjakan. Atas rahmat-Nya serta kesungguhan dan kecintaan saya terhadap tema yang saya angkat, *Alhamdulillah*, skripsi ini dapat selesai dengan baik meski saya yakin masih begitu banyak kekurangannya.

Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih yang amat banyak kepada semua orang yang telah membimbing, membantu, serta mendoakan saya selama mengerjakan skripsi ini, terutama kepada:

- (1) Mas Is, selaku dosen pembimbing yang begitu sabar memberikan saran serta masukan kepad saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Mas Maman, kepala jurusan Dept. Ilmu Sejarah yang telah mau membagi sumber yang saya butuhkan;
- (3) Mba Linda, atas kuliah-kuliah Asia Tenggara yang saya dapatkan selama kuliah;
- (4) Kepada seluruh dosen Ilmu sejarah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
- (5) Seluruh teman-teman Sejarah angkatan 2006 yang telah begitu berwarna, ada Tommy, Boik, Firman, Erik, Adi, Acong, Yudho, Ashagi, Lucky, Ilho, Pras, Ano, Ghamal, Rully, Adit Gonz, Yoga, Dedi, Hasyim, Megi, Dina, Moti, Rima, Robi, Kenny, Ary, Safira, Amal, Ratna, Winda, dan Shenry. Terima kasih telah member banyak hal selama kita kuliah bersama
- (6) Seluruh mahasiswa Ilmu Sejarah UI angkatan 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, dan 2010 serta abang-abang dan mba-mba Alumni Sejarah.
- (7) Teman-teman pengurus dan staff Forum Amal dan Studi Islam (FORMASI) FIB UI
- (8) Teman-teman pengurus dan staff Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIB UI 2009, khususnya Okta (akhirnya kita lulus juga) dan Tommy (tetap semangat

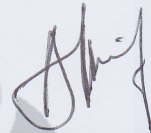
nyong, lulus duluan bukan berarti sukses duluan. Kalo kata Anies Baswedan, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Tapi insya Allah, kita berdua bakal sukses nyong, Amin.....)

- (9) Teman-teman ‘mafia’ angkatan 2006 (Johan, Mawan, Ramdhan, Edi, Wahid, Dwi, Irvan, Tegar, Ica, Santi, Diyu, Avi, Ridha, dan Yana), 2007 (Sam, Annas, Ijonk, Fini, Bela, Ida, Alfi, Savira, Fatimah, Rani, Risma, dll), 2008 (Alvin, Santoso, Sauqi, Fatimah, Fatcil, Titin, Wafa, Asti, Lu’lu, Ratih, dll) serta 2009 dan 2010 yang saya tidak hapal namanya satu persatu
- (10) Teman-teman satu kelompok pengajian yang telah memberikan dorongan moril. Terima kasih untuk Reby Bagja, Aulia Reza, Mirza Aldi, dan Weda Gintung
- (11) Guru spiritual saya, Bang Haji Maryadi serta Ustadz Soleh. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Maaf Pak Haji Maryadi, diantara yang lain, rasa-rasanya saya yang paling banyak ngomong dan mendebat *antum*, hehe...
- (12) Teman-teman dari Bimbingan Belajar Alumni SMA 99, tempat saya mencari sesuap nasi, seteguk air, dan segenggam berlian (hehe...)
- (13) Tongkrongan para pencari makan malam, terutama akang-akang wedang jahe. Bung Ihwan Nurdin, akang Rifki ‘Peyank’ Ramadhan, dan bung Rahmat ‘Matdem’ Saputra.
- (14) Kakak-kakak saya tercinta, Andi Ivan Patonangi, Andi Asrul, Andi Aslam, Andi Yuni Miranti, Andi Anil, Andi Rosalina, Andi Alamsyah, Andi Rosaria, Andi Muhammad Akbar, Andi Firman, Andi Kharisma, dan Andi Maharani.
- (15) Para keponakanku yang sangat saya sayangi, yang telah bersedia mengganggu saya selama pembuatan skripsi ini hingga membuat saya cukup stress. Andi Rizki ‘Audah al-Fatih, Farhat al-Banna, Rafi al-Adnan, kalian memang ‘teroris’ cilik.
- (16) Terakhir, terakhir tapi paling istimewa, dua orang manusia yang rasa cinta saya kepada mereka hanya kalah dari kecintaan saya kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, almarhum ayahanda tercinta, Andi Bachtiar, seorang *family man*, yang rasa-rasanya hampir tidak pernah memarahi saya. Sayang, beliau tidak bisa menyaksikan anaknya lulus. Serta wanita paling tegar yang pernah saya lihat, ibunda tercinta, Siada Siga Daeng Intan. Mama yang selalu

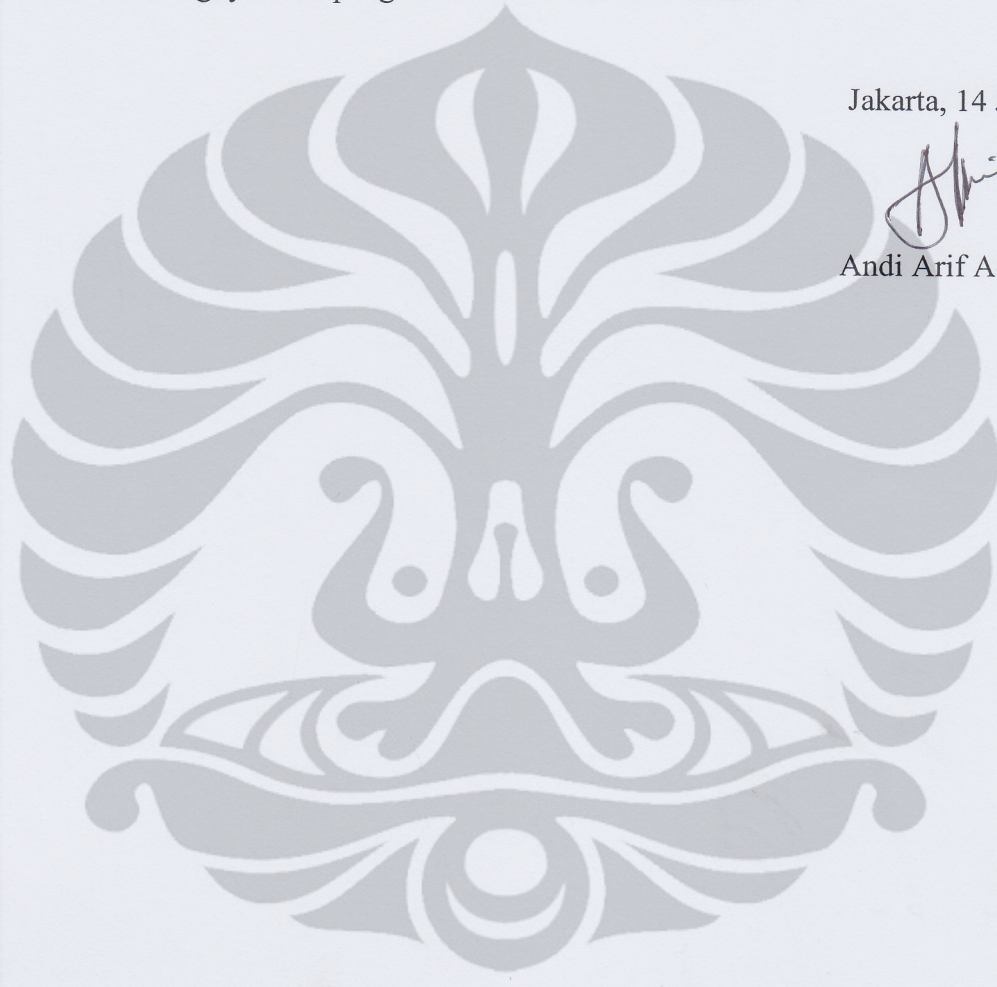
memberikan dukungan penuh kepada saya dan memberikan kepercayaan penuh kepada apapun yang saya lakukan. Rasanya saya tidak akan pernah bisa membalas jasa kalian, mama dan *tetta*.

Atas bantuan, dukungan, dan perhatiannya saya sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya sekali lagi. Semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia ini. Amin.

Jakarta, 14 Juli 2011



Andi Arif Adi Mulya



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Arif Adi Mulya
NPM : 0606086810
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Ilmu Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan hak kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Peran Partai Islam Se-Malaysia Dalam Upaya Penegakan Syariat Islam Di
Kelantan 1978-1990

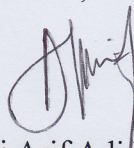
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Juli 2011

Yang menyatakan,



(Andi Arif Adi Mulya)

ABSTRAK

Nama : Andi Arif Adi Mulya

Program Studi : Ilmu Sejarah

Judul : Peran Parti Islam Se-Malaysia Dalam Upaya Penegakan Syariat Islam di Kelantan 1978-1990

Skripsi ini membahas peran Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dalam upaya penegakan syariat Islam di salah satu Negara bagian Malaysia, Kelantan pada kurun waktu 1978 hingga 1990. Disamping memaparkan hal-hal yang dilakukan PAS untuk mewujudkan Negara yang berlandaskan syariat Islam, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana persaingan antara PAS dengan partai Melayu lainnya, UMNO. Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya PAS menegakkan syariat Islam melalui pemilu harus berhadapan dengan kekuatan politik UMNO yang sangat kuat. Skripsi ini juga menyuguhkan bagaimana masyarakat Kelantan memberikan dukungan yang sangat besar kepada PAS sehingga syariat Islam yang diupayakan PAS berhasil ditegakkan meski sempat menghadapi masalah pada periode 1980-an.

Kata Kunci:

PAS, Syariat Islam, Kelantan, Pemilu, UMNO

ABSTRACT

Name : Andi Arif Adi Mulya

Study Program: History

Title : The Role of Islamic Party of Malaysia in Islamic Sharia
Enforcement efforts in Kelantan 1978-1990

This undergraduate thesis discusses the role of Islamic Party of Malaysia (also called PAS) in one of the states, Kelantan, for the period 1978 to 1990. Besides describing things that are done by Islamic Party to build a state based on Islamic Sharia, this research also points out the competition between PAS and the other Malayan party, UMNO. This research describes PAS efforts to build Islamic Sharia through the general election that has to face the very strong political power of UMNO. This undergraduate thesis also points out that Kelantan society gives significant support to PAS, so that Islamic Sharia can be built though it still has face problems in 1980s.

Key Words:

PAS, Islamic Sharia, Kelantan, general election, UMNO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	Xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. perumusan Masalah.....	5
I.3. Tujuan Penulisan.....	5
I.4. Metode Penulisan.....	6
I.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
I.6. Tinjauan Pustaka.....	7
I.7. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II BERDIRINYA PARTI ISLAM SE-MALAYSIA.....	11
II.1. Sejarah Penyebaran Islam di Malaysia.....	11
II.2. Pendirian Parti Islam Se-Malaysia.....	15
II.3. Pembentukan PAS di Kelantan.....	19
BAB III PERMASALAHAN PARTI ISLAM SE-MALAYSIA DALAM POLITIK MALAYSIA	22
III.1. Keikutsertaan PAS dalam Pemilu 1955 dan 1959.....	22
III.2. Kebijakan PAS di Kelantan Hingga Pemilu 1969.....	30
III.3. Krisis Etnis 1969 dan Pembentukan Koalisi PAS-Aliansi ke Dalam Barisan Nasional.....	33
III.4. Krisis Kelantan dan Kekalahan PAS Pada Pemilu 1978.....	35
BAB IV PERJUANGAN PAS DALAM PENEGAKAN NEGARA ISLAM.....	41
IV.1. Radikalisme Kepemimpinan PAS Pasca Pemilu 1978.....	41
IV.2. Tantangan Kebijakan Islamisasi Mahathir Mohammad Terhadap PAS.....	44

IV.3. Kemenangan Pemilu 1990: Keberhasilan Menguasai Kembali Kelantan.....	48
BAB V KESIMPULAN.....	52
BIBLIOGRAFI.....	56
LAMPIRAN.....	60



DAFTAR ISTILAH

Ashobiyah	: fanatisme golongan
Barisan Nasional	: merupakan koalisi antar partai politik di Malaysia yang diketuai oleh UMNO. Barisan Nasional merupakan pemegang pemerintahan federal di Malaysia dan berkuasa hampir seluruh Negara bagian.
<i>Darul Ahd</i>	: merupakan istilah untuk menyebut Negara yang memiliki perjanjian dengan Negara Islam. Istilah ini dikemukakan oleh Abdul Hadi Awang.
<i>Darul Harb</i>	: istilah dalam bahasa Arab yang berarti Negara kafir. Istilah ini dipopulerkan oleh Sayyid Quthb, seorang tokoh pemikir Ikhwanul Muslimin.
<i>Darul Islam</i>	: Negara Islam
Hudud	: hukum yang berlandaskan pada syariat Islam.
<i>Ikhwanul Muslimin</i>	: gerakan keagamaan yang berkembang di Timur-Tengah pada awal abad ke-20. Gerakan yang didirikan oleh Hasan al-Banna ini member pengaruh kuat terhadap Parti Islam Se-Malaysia (PAS) pada periode 1980-an.
<i>Jahiliyyah</i>	: istilah dalam bahasa Arab yang berarti bodoh.
<i>Jamiat Islami</i>	: merupakan gerakan keagamaan yang berkembang di Pakistan dan dibentuk oleh Abul A'la al-Maududi. Seperti halnya Ikhwanul Muslimin, Jamiat Islami juga memberikan pengaruh yang kuat terhadap PAS.
Kaum Muda	: sebutan bagi kelompok reformis Malaysia
Kaum Tua	: sebutan untuk kelompok ulama tradisional yang menolak ide-ide gerakan reformasi agama.

- Mohammedan Law* : merupakan UU yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Inggris di Malaya dan telah mendapatkan masukan dari ulama.
- Mustadh'afin* : istilah dalam bahasa Arab yang berarti orang-orang lemah.
- National Operations Council*: badan yang dibentuk oleh pemerintah setelah peristiwa kerusuhan etnis 13 Mei 1969. Badan ini kemudian mengambil tugas-tugas dari pemerintah Malaysia
- New Economic Policy* : kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Malaysia yang dikeluarkan setelah terjadinya kerusuhan etnis di Malaysia pada tahun 1969. Kebijakan ini memberikan hak-hak istimewa kepada etnis Melayu yang tidak didapatkan oleh etnis lain.
- Pan-Islamisme* : gerakan yang ingin mempersatukan Islam. Gerakan ini dipelopori oleh Jamaludin al-Afghani dan Muhammad Abduh serta memiliki peranan penting dalam munculnya kelompok reformis di Malaysia pada awal abad ke-20
- Pondok* : sekolah-sekolah agama yang banyak terdapat di Kelantan.
- Sekularisme* : merupakan paham yang memisahkan antara kepentingan Negara dengan agama.
- Thogut* : sesembahan selain Allah.
- Tok Guru* : sebutan untuk orang yang dihormati. Bisa juga merupakan sebutan untuk seorang ulama.
- Yang Dipertuan Agong* : merupakan istilah untuk menyebut Sultan Malaysia. Yang Dipertuan Agong dipilih dari sultan-sultan Negara bagian di Malaysia.

DAFTAR SINGKATAN

ABIM	: Angkatan Belia Islam Malaysia
AMIPF	: All Malaysia India Progressive Party
API	: Angkatan Pemuda Insaf
APU	: Angkatan Perpaduan Ummah
Berjasa	: Barisan Jemaah Islam Malaysia
BN	: Barisan Nasional
CCC	: Chinese Consultative Committee
DAP	: Democratic Action Party
IRC	: Islamic Representative Council
MCA	: Malayan Chinese Association
MIC	: Malayan Indian Congress
MSP	: Malaysian Solidarity Party
NAP	: National Association of Perak
NEP	: New Economic Policy
NOC	: National Operations Council
PAP	: People Action Party
PAS	: Parti Al-Islam Se-Malaysia
PERUPA	: Pertubuhan Pemimpin Remaja
PKMM	: Parti Kebangsaan Melayu Se-Malaya
PMIP	: Pan-Malayan Islamic Party
PML	: Party of Malayan League
PPMK	: Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan
PPP	: People's Progressive Party
PRM	: Parti Rakyat Malaysia
SNAP	: Serawak National People's Party
UCSCAM	: United Chinese School Committees' Association of Malaysia
UCSTAM	: United Chinese School Teacher's Association of Malaysia
UDP	: United Democratic Party

UMNO

: United Malays National Organization



DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Perolehan suara partai-partai politik dan kandidat independen pada Pemilu 1955.....	23
Tabel III.2 Perolehan suara partai politik dan kandidat Independen pada pemilu Negara bagian 1959.....	29
Tabel III.3 Perolehan suara partai politik dan kandidat Independen pada Pemilu parlemen 1959.....	30
Tabel III.4 Perolehan kursi partai politik pada Pemilu Parlemen di Semenanjung Malaysia 1978.....	37
Tabel III.5 Perolehan kursi partai politik pada pemilihan Negara bagian 1978 di Semenanjung Malaysia (tidak termasuk pemilihan Negara bagian Kelantan).....	38

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Manifesto PAS Kelantan 1969
- II. Pernyataan salah satu petinggi PAS menyikapi kebijakan PAS di Kelantan
- III. Pernyataan Presiden PAS, Yusof Rawa dalam menyikapi bentuk Negara Islam yang dilontarkan UMNO
- IV. Peta Kelantan
- V. Bendera Negara Bagian Kelantan
- VI. Lambang Parti Islam Se-Malaysia (PAS)
- VII. Gambar foto suasana Pemilihan Umum 1969
- VIII. Gambar foto suasana kota Kuala Lumpur saat Krisis Etnis 1969
- IX. Gambar foto korban krisis etnis 1969
- X. Gambar foto suasana jalan saat krisis etnis 1969
- XI. Gambar Foto suasana demonstrasi menolak turunnya Mohammad Nasir
- XII. Foto-foto pemimpin PAS (Burhanuddin al-Helmy, Muhammad Asri, Yusof Rawa, Fadzil Mohammad Noor, Abdul Hadi Awang, Nik Abdul Aziz Nik Mat)

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Malaysia, sebuah Negara yang terletak di semenanjung Malaya adalah sebuah Negara yang terdiri atas 11 negara bagian dan identik dengan budaya Melayu. Meski terdapat pula etnis Cina dan India, namun pengaruh etnis Melayu lebih kuat. Ini juga diakibatkan oleh adanya penerapan *New Economic Policy* (NEP) di Malaysia yang menguntungkan etnis Melayu karena hak-hak istimewa yang didapatkan sejak terjadinya kerusuhan etnis di Malaysia pada tahun 1969. Kentalnya budaya Melayu di Malaysia berimbas pada kuatnya pengaruh Islam di Malaysia. Islam menjadi agama resmi di Malaysia sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi Federal Malaysia pasal 3. Kedudukan istimewa ini juga diperkuat dengan adanya sistem kesultanan dan sistem *Yang Di-Pertuan Agong* yang menjadi pemimpin tertinggi urusan Islam di Malaysia.¹

Kelantan, sebuah Negara bagian yang bernama resmi Kelantan Darul Naim memiliki luas sekitar 14.992 km². Letaknya yang berbatasan dengan Thailand membuat wilayah Kelantan memiliki akar sejarah yang kuat dengan wilayah Pattani di Thailand.² Kedekatan dengan Pattani inilah yang membuat budaya yang ada di Kelantan lebih serupa dengan kebudayaan Melayu Pattani daripada dengan kebudayaan Melayu yang ada di wilayah Malaysia bagian selatan karena sama-sama merupakan daerah yang didominasi oleh masyarakat pertanian tradisional. Meskipun demikian, terdapat perbedaan diantara kedua wilayah tersebut. Pattani yang tunduk terhadap pemerintah Thailand yang didominasi oleh agama Buddha tidak dapat menerapkan syariat Islam, berbeda dengan Kelantan yang mampu menerapkan syariat Islam terhadap penduduknya.

Satu hal yang membedakan antara Kelantan dengan Negara-negara bagian di Malaysia adalah keberhasilan mereka dalam menerapkan syariat Islam sebagai landasan hukum di Kelantan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kuatnya Islam di Kelantan yang juga menjadi bagian dari etos kerja masyarakat Kelantan. Etos

¹ Ahmad Ibrahim, *Islam di Asia Tenggara*, LP3ES. Jakarta. 1990. hal 327

² Berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Siam di tahun 1948, disepakati bahwa Pattani masuk ke dalam wilayah Thailand, sedangkan Kelantan masuk ke dalam wilayah Malaysia.

kerja Islam yang dianut oleh masyarakat dimungkinkan karena pengaruh sekolah atau dikenal dengan nama *Pondok*, yang menjadi tempat pendidikan agama Islam. Lokasi *Pondok* biasanya dibangun berdekatan dengan masjid yang menjadi inti dari pendidikan di Kelantan. Pada tanggal 5 Agustus 1917, dibangun sebuah *Pondok* yang di kemudian hari menjadi *Pondok* paling dikenal bernama *al-Madrasah al-Muhammadiyah al-Kelantaniyyah*³.

Pondok yang ada rata-rata dikepalai oleh seorang ulama yang disebut 'alim atau *Tok Guru*. *Tok Guru* inilah yang memiliki kewenangan untuk menentukan kurikulum dan buku yang digunakan di dalam pendidikan *Pondok*. Sementara itu, unsur lain yakni guru-guru, asisten guru, serta murid yang lebih senior memiliki kewajiban untuk mengajarkan ilmu agama. Kewajiban mengajar yang dilakukan oleh tiga unsur tadi tidak hanya dilakukan di dalam *Pondok* terhadap murid *Pondok*, melainkan juga terhadap semua orang dewasa yang tinggal di sekeliling *Pondok*.⁴ Pada akhirnya, pengaruh dari sekolah *Pondok* ini begitu besar terhadap perkembangan masyarakat Kelantan, terutama pada masa sebelum kemerdekaan Malaysia. Pengaruh yang luas ini nantinya juga berperan besar terhadap kemenangan PMIP yang berubah menjadi *Parti Islam Se-Malaysia* dalam Pemilu di tahun 1959.

PAS yang didirikan pada 24 November 1951 setelah sebelumnya bernama *Persatuan Ulama Se-Malaya* memilih Islam sebagai azas partai. *Persatuan Ulama Se-Malaya* pada awalnya adalah divisi keagamaan di dalam UMNO yang memutuskan untuk keluar karena adanya ketidaksepahaman dalam memandang penegakan hukum-hukum Islam di Malaysia. Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah seorang petinggi PAS di Kelantan, *Amaluddin Darus*, cita-cita dan prinsip perjuangan PAS adalah 'mewujudkan sebuah pemerintahan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits serta rakyatnya mengamalkan Islam sebagai cara hidup'.⁵

Berdirinya PAS tidak terlepas dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah adanya gerakan ulama yang menentang kekuasaan Inggris di semenanjung

³ Abdullah Alwi Haji Hasan. *The Administration of Islamic Law in Kelantan*, hal 220

⁴ *Ibid*, hal 224

⁵ www.kelantan.pas.org.my

Melayu. Gerakan ini dipelopori oleh Tok Janggut dan Haji Mahmoud Yusoff bin Ahmad. Faktor kedua adalah dibolehkannya perjudian dan tidak adanya langkah tegas dari UMNO sebagai partai yang dianggap merepresentasikan Melayu dalam kasus permurtadan yang terjadi di Kelantan. Faktor ketiga adalah adanya pengaruh dari berbagai gerakan Islam reformis di berbagai wilayah dunia seperti di Indonesia (*Masyumi*), Pakistan (*Jamaat Islami*), serta Mesir (*Ikhwanul Muslimin*). Faktor ketiga ini juga membawa dampak yang cukup besar atas berdirinya PAS⁶. Pemikiran dari Masyumi sendiri dibawa oleh Bustamin bin Ismail, seorang pemuda yang dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.⁷

Meskipun telah didirikan pada 1951, namun pendirian ranting pertama PAS di wilayah Kota Bharu yang merupakan ibukota Kelantan baru terlaksana pada tahun 1952. Pendirian ini diikuti dengan pendirian ranting di wilayah Pasir Mas. Pendirian resmi PAS di Pasir Mas dilaksanakan pada 23 Juli 1953. Sementara itu, kegiatan politik PAS diaplikasikan dengan keikutsertaan mereka dalam Pemilu 1955. Akan tetapi, keikutsertaan mereka dalam Pemilu 1955 belum memberikan dampak yang signifikan sebagai akibat belum terlalu luasnya pengaruh PAS meski PAS berhasil menjadi satu-satunya partai politik non-pemerintah yang mendapatkan kursi di parlemen.

Sikap tegas PAS dalam upaya penerapan hukum-hukum Islam semakin terlihat ketika Dr. Burhanuddin al-Helmy menjadi pemimpin PAS pada akhir 1956. Sikap tegas ini diperlihatkan oleh Dr. Burhanuddin al-Helmy yang mengatakan bahwa “ *Dalam perjuangan kita (PAS) bagi mencapai kemerdekaan, kita telah dan terus menerus memperjuangkan Melayu itu sebagai kebangsaan bagi Negara Tanah Melayu ini dengan bertapak di atas asas ideology Islam yang maha suci*”.⁸

Sebagai kekuatan baru di dalam politik Malaysia, PAS baru terlihat pada tahun 1959 ketika Pemilu dilaksanakan pertama kali sejak kemerdekaan Malaysia dari Inggris. Pada Pemilu yang diselenggarakan di bulan Agustus 1959 ini, PAS berhasil memenangkan 28 kursi dewan dari 30 kursi yang diperebutkan.

⁶ ibid

⁷ www.pas.org.my

⁸ Jabatan Arkib PAS Pusat, Sejarah Parti Islam Se-Malaysia, hal 2

Kemenangan ini membuat PAS berhak untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kelantan. Keberhasilan PAS memenangkan Pemilu di Kelantan merupakan fenomena di dalam peta perpolitikan Melayu yang didominasi oleh *United Malays National Organization* (UMNO). Kemenangan PAS ini disambut luas dan mendapat dukungan dari masyarakat Kelantan meskipun dukungan tersebut tidak selalu berarti dukungan dalam bentuk penghitungan suara. Keluarnya *Akta Bahasa Kebangsaan* pada tahun 1967 membuat suara untuk PAS semakin besar sebagai akibat kekecewaan orang-orang Melayu terhadap pemerintah yang didominasi oleh UMNO. Kekecewaan itu didasarkan pada tidak tegasnya pengaturan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi di Malaysia dan masih dipergunakannya bahasa Inggris dalam urusan-urusan resmi di Malaysia sehingga berakibat keluarnya guru-guru di Semenanjung Malaya dari UMNO dan memutuskan untuk bergabung dengan PAS yang sejak pendiriannya telah secara tegas mengatakan bahwa mereka adalah partainya orang-orang Melayu dan akan memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara⁹.

Perpecahan yang terjadi di internal PAS pada pertengahan tahun 1972 menyebabkan pendirian partai-partai pecahan PAS, seperti Partai Berjasa (Barisan Jamaah Islamiah Malaysia). Perpecahan ini disebabkan oleh faktor perbedaan pendapat di dalam PAS berkaitan dengan keputusan PAS berkoalisi dengan UMNO. PAS secara resmi bergabung dalam koalisi Barisan Nasional pada tahun 1974. Ini berarti, PAS yang sejak kemenangan di tahun 1959 secara tegas menyatakan diri sebagai partai oposisi tidak lagi menjadi oposisi di dalam pemerintahan. Dalam hal ini, peran PAS sebagai partai yang mengusung nilai-nilai Islam digantikan oleh UMNO yang semakin terlihat Islami pasca kerusuhan rasial di tahun 1969¹⁰. Keputusan PAS untuk bergabung ke dalam koalisi juga dipengaruhi oleh adanya kerusuhan rasial yang terjadi pada masa Pemilu 1969.

⁹ Abdul Rahman Haji Ismail, Malaysia, *Sejarah Kenegaraan dan Politik*. Dawama Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. 2005. hal. 347

¹⁰ Di dalam buku *Islam di Asia Tenggara*, disebutkan bahwa dukungan pemerintah Malaysia terhadap gerakan-gerakan dakwah yang ada tidak lain adalah agenda politik. Lebih jauh, para pengamat seperti Anthony Miller dan John Funston menilai dengan dukungan ini, UMNO bahkan terlihat lebih merepresentasikan Islam ketimbang PAS.

Koalisi yang kemudian disebut dengan nama Barisan Nasional ini berhasil memenangkan 135 dari total 154 kursi Dewan Rakyat.

Konflik internal ini menyebabkan PAS menderita kekalahan dalam Pemilu tahun 1978. Pada Pemilu tersebut, PAS hanya mendapatkan dua kursi dari total 36 kursi yang diperebutkan. Jumlah ini jauh lebih kecil dari perolehan kursi UMNO yang berhasil memenangkan Pemilu di Kelantan dengan perolehan 23 kursi serta Berjasa yang berhasil mendapatkan 11 kursi. Dalam pemilihan nasional di tahun yang sama, PAS hanya mendapatkan lima kursi dari 154 kursi yang diperebutkan. Kekalahan ini juga disebabkan oleh karena terjadi krisis politik di negeri Kelantan pada tahun 1977 yang membuat PAS harus keluar dari Barisan Nasional.

Dalam skripsi ini, penulis berusaha untuk menjelaskan langkah-langkah apa yang diupayakan oleh PAS dalam perjuangan penegakan syariat Islam di Kelantan. PAS harus berbenturan dengan UMNO sebagai sesama partai Melayu dalam mengupayakan tegaknya syariat Islam.

I.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan sebuah pertanyaan untuk mencari pertanyaan risetnya. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah :

Bagaimana Peranan PAS dalam upaya penerapan syariat Islam di Kelantan ?

Dari pertanyaan perumusan masalah tersebut, dapat diajukan untuk research question adalah :

1. Bagaimana masyarakat Kelantan memandang syariat Islam?
2. Apa langkah-langkah yang diupayakan oleh PAS dalam penegakan syariat Islam?
3. Apa hasil yang diperoleh PAS dalam upaya penegakan syariat Islam?

I.3. Tujuan Penulisan

1. Menggambarkan struktur masyarakat Kelantan
2. Menjelaskan persaingan antara PAS dengan Barisan Nasional dalam Pemilu

di Malaysia, khususnya Kelantan

3. Menjelaskan peranan PAS dalam upaya penerapan syariat Islam di Kelantan

I.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas empat tahap, yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan tema penelitian.

Pencarian sumber-sumber dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan FIB UI, perpustakaan FISIP UI, serta mengakses jurnal *online* (*jstor.org*). Dari pencarian sumber di tiga tempat tersebut, didapatkan beberapa sumber yang cukup representatif untuk penulisan skripsi. Beberapa diantaranya yang dapat disebutkan disini adalah buku yang ditulis oleh Abdul Rahman Haji Ismail yang berjudul, *Malaysia, Sejarah Kenegaraan dan Politik*, serta dua jurnal online seperti yang ditulis oleh John Funston berjudul *The Origin of PAS* serta yang ditulis oleh Khoo Kay Kim yang berjudul *Islam and Politics in Kelantan*.

Langkah kedua adalah kritik. Sumber-sumber yang ada kemudian diuji kebenarannya dengan menggunakan sumber lain yang satu tema permasalahan. Dalam proses kritik ini, penulis tidak mendapatkan adanya perbedaan pendapat di masing-masing buku.

Langkah ketiga adalah interpretasi. Setelah mendapatkan sumber-sumber terkait, penulis melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber yang didapatkan. Pemikiran subyektif sebisa mungkin penulis hindari dan berusaha untuk dapat melakukan penafsiran secara obyektif.

Langkah terakhir adalah historiografi. Setelah mendapatkan sumber-sumber yang diharapkan, juga setelah melakukan kritik dan mencoba melakukan penafsiran terhadap sumber yang ada, maka penulis melakukan rekonstruksi terhadap peristiwa yang terjadi berdasarkan sumber-sumber yang penulis dapatkan.

I.5. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam skripsi ini, periodisasi dilakukan dengan mengambil tahun 1978-1990. Periodisasi ini diambil berdasarkan kondisi politik Kelantan yang terjadi pada tahun 1978 disaat PAS mengalami kekalahan dalam perebutan kursi di Kelantan oleh UMNO. Sedangkan tahun 1990 diambil karena pada tahun 1990, PAS yang memenangkan Pemilu berhasil menjadikan Islam sebagai dasar hukum negeri Kelantan. Rentang waktu tahun 1978-1990 ini yang nanti akan menjadi fokus penelitian.

Penulis memilih Kelantan sebagai ruang lingkup geografis karena Kelantan secara kultural memiliki kedekatan dengan PAS. Pendirian *Pondok* yang banyak terdapat di Kelantan menjadi salah satu faktor pendukung kuatnya dukungan masyarakat Kelantan terhadap PAS. Penulis juga melakukan perbandingan dengan upaya PAS menegakkan syariat Islam di negara bagian lain untuk memperlihatkan dukungan masyarakat Melayu terhadap PAS.

I.6. Tinjauan Pustaka

Terdapat sebuah skripsi yang telah ditulis oleh mahasiswa FISIP UI berjudul 'Parti Islam Sa-Malaysia (PAS) : Gerakan Radikalisasi Malaysia 1982-1984' ini dibuat pada tahun 1986 dan ditulis oleh Notosusanto. Perbedaan antara karya ini dengan apa yang saya tulis terletak pada perbedaan masalah yang diambil. Skripsi Notosusanto tersebut memandang PAS sebagai gerakan radikal yang ingin menerapkan hukum-hukum Islam. skripsi yang sedang saya susun mencoba mengangkat peranan dan upaya PAS dalam upaya penegakan hukum-hukum Islam. Periodisasi waktu juga berbeda sehingga skripsi yang sedang saya susun berbeda dengan karya yang sudah ada sebelumnya.

Kemudian, terdapat beberapa buku seperti yang ditulis oleh Ahmad Ibrahim dan kawan-kawan. Buku yang berjudul Islam di Asia Tenggara, Perkembangan Kontemporer ini menjelaskan tentang Islam di Asia Tenggara. Secara lebih spesifik, buku ini menjelaskan pula bagaimana kondisi Islam di wilayah Malaysia secara luas. Dijelaskan bagaimana perkembangan Islam di Malaysia setelah Perang Pasifik dan perkembangan organisasi-organisasi keislaman di Malaysia.

Relevansi buku ini dengan proposal skripsi yang akan ditulis adalah adanya penjelasan yang cukup detail tentang kondisi politik Islam di Malaysia serta penjelasan mengenai *Parti Islam Se-Malaysia*, yang membuat penulisan proposal skripsi ini menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

Juga terdapat buku yang ditulis oleh Mohammed Ayoob berjudul *The Politics of Reassertion*. Buku yang diterbitkan oleh *Vikas Publishing* ini memberikan gambaran bagaimana kondisi perpolitikan Islam di berbagai wilayah dunia, termasuk Malaysia. Sebagaimana yang terdapat di buku-buku lain, buku ini juga membahas mengenai PAS dan persaingannya dengan UMNO, partai politik yang awalnya adalah induk dari PAS. Dijelaskan bahwa organisasi-organisasi Islam mengalami perkembangan yang signifikan memasuki era 1960-1970'an dengan berdirinya organisasi seperti *Angkatan Belia Islam Malaysia* atau ABIM, kemenangan PAS di beberapa wilayah, serta dibentuknya *Darul Arqom*. Yang menarik dalam pembahasan buku ini adalah bagaimana sikap pemerintah Malaysia yang menolak untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara meski mendukung penerapan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan masyarakat. Buku ini dapat memberikan gambaran jelas bagaimana pandangan pemerintah Malaysia dalam melihat Islam sebagai suatu sistem politik dan penerapan syariat Islam menjadi dasar Negara. Hal menarik untuk dibahas adalah bagaimana hubungan antara pemerintah yang didominasi oleh Barisan Nasional dengan UMNO menjadi pemimpinnya dengan PAS dalam proses penegakan syariat Islam di Malaysia, khususnya di Kelantan.

Abdul Rahman Haji Ismail juga menulis sebuah buku yang berjudul *Malaysia, Sejarah Kenegaraan dan Politik* yang terdiri atas beberapa bab yang menjelaskan sejarah pembentukan Malaysia yang dimulai dari zaman kerajaan Malaka hingga Malaysia tahun 2000. Di dalam bab Sejarah Politik Malaysia, terdapat penjelasan singkat tentang pembentukan PAS yang pada awalnya merupakan bagian dari UMNO. Terbentuknya PAS disebabkan oleh karena adanya perbedaan pendapat di dalam UMNO dalam urusan penegakan syariat Islam sehingga para ulama yang tergabung dalam *Persatuan Ulama se-Malaya* mendirikan PAS.

Islam and Politics in Kelantan yang ditulis oleh Khoo Kay Kim dan merupakan sebuah artikel di dalam jurnal memberikan gambaran mengenai pandangan masyarakat Kelantan terhadap Islam dan Politik. Dijelaskan di dalam artikel bahwa etos kerja Islam yang dianut oleh masyarakat Kelantan tidak dapat dipisahkan dari peran *Pondok*, sebuah institusi pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat Kelantan. Peran penting *Pondok* dalam penyebaran Islam juga disebabkan oleh Khoo Kay Kim yang menulis artikel ini yang menyebutkan bahwa masjid-masjid *Pondok* tidak jarang juga berfungsi sebagai masjid kampung sehingga masyarakat kampung menggunakan masjid *Pondok* dalam kegiatan peribadatan sehari-hari. Relevansi artikel ini dengan proposal skripsi yang saya ajukan adalah, artikel ini memberikan penjelasan yang luas mengenai pandangan masyarakat Kelantan terhadap Islam dan Politik, sehingga akan ditemukan faktor penyebab keberhasilan PAS memenangkan Pemilu di Kelantan dan diterapkannya syariat Islam di Kelantan.

Juga terdapat artikel yang ditulis oleh John Funston berjudul *The Origins of Parti Islam Se-Malaysia*. Artikel ini memberikan penjelasan yang lengkap mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *Parti Islam Se-Malaysia*. Penjelasan di artikel ini menjelaskan bagaimana PAS terbentuk, termasuk pula sejarah pembentukannya. Sebagai pendahuluan dijelaskan mengenai kondisi Islam pada masa Perang Dunia dan setelah Perang Dunia. Terdapat pula penjelasan mengenai sikap PAS terhadap UMNO yang memperlihatkan sikap oposisi PAS terhadap kebijakan UMNO. Relevansi antara artikel ini dengan proposal skripsi yang saya ajukan adalah artikel ini mampu memberikan gambaran jelas mengenai PAS serta permasalahan yang terjadi antara PAS dengan UMNO. Permasalahan ini menjadi hal penting untuk dibahas agar dapat memberikan gambaran apa upaya yang dilakukan PAS dalam menegakkan syariat Islam di Malaysia, khususnya di Kelantan.

I.6. Sistematika Penulisan

Di dalam bab I yang merupakan pendahuluan terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Di dalam bab II yang berjudul Berdirinya Parti Islam Se-Malaysia yang terdiri dari Sejarah Penyebaran Islam di Malaysia, Pendirian Parti Islam Se-Malaysia, dan Pembentukan PAS di Kelantan.

Di dalam bab III yang berjudul Permasalahan Parti Islam Se-Malaysia Dalam Politik Malaysia terdiri atas Keikutsertaan PAS dalam Pemilu 1955 dan 1959, Kebijakan PAS di Kelantan hingga Pemilu 1969, krisis etnis 1969 dan pembentukan koalisi PAS-Aliansi ke dalam Barisan Nasional.

Di dalam bab IV yang berjudul Perjuangan PAS dalam pendirian Negara Islam terdiri atas radikalisme kepemimpinan PAS pasca Pemilu 1978, tantangan kebijakan Islamisasi Mahathir Mohammad terhadap PAS, dan kemenangan Pemilu 1990: keberhasilan menguasai kembali Kelantan.

Di dalam bab V yang merupakan penutup terdiri atas kesimpulan. Terakhir adalah Daftar pustaka

II. Berdirinya Parti Islam Se-Malaysia

II. 1. Sejarah Penyebaran Islam di Malaysia

Melemahnya kerajaan Aceh yang merupakan pusat politik dan studi Islam pada abad ke-17 menyebabkan tumbuhnya pusat-pusat pendidikan Islam baru di berbagai wilayah, diantaranya di Pulau Penyengat dan Pattani. Munculnya Pattani menggantikan fungsi Aceh sebagai pusat pendidikan Islam mendorong perkembangan pendidikan Islam ke wilayah pantai timur dan utara Semenanjung Melayu seperti di Trengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, dan Pulau Pinang.¹¹ Penyebaran pendidikan Islam ini diikuti dengan pembentukan sekolah-sekolah Islam atau yang dikenal dengan nama *Pondok* di beberapa tempat seperti di Kelantan dan Trengganu. Melalui institusi *Pondok* inilah lahir kemudian tokoh-tokoh Islam terkemuka di Malaysia.

Selain dari Pattani, perkembangan Islam di Malaysia juga tidak terlepas dari peranan ulama-ulama dari Indonesia. Di wilayah Kedah, pernah dilantik seorang Mufti yang berasal dari Palembang. Ulama tersebut bernama Syekh Abdul Jalil bin Abdul Wahab yang menjadi Mufti pada abad ke-18. Posisi Syekh Abdul Jalil ini kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Wan Abdul Qadir.¹² Selain dari Palembang, terdapat pula ulama dari Banjarmasin bernama Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari. Sementara di Perak, pengaruh ulama asal Sumatera terasa dengan pembangunan *Pondok* yang didirikan oleh ulama asal Aceh. Di Pahang, seorang ulama keturunan Bugis bernama Haji Uthman bin Senik menjadi mufti Pahang. disini terlihat bahwa ulama-ulama asal Pattani dan Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan Islam di Malaysia.

Sultan yang berkuasa di kerajaan-kerajaan Malaysia memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan Islam. Sultan dan Islam dianggap sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisah sehingga semua kebijakan yang berkaitan dengan Negara seperti pembangunan masjid dan penunjukan kadi serta mufti menjadi hak prerogatif sultan. Pada akhir abad ke-19, beberapa orang sultan yang

¹¹ Abdul Rahman Haji Abdullah, "Pemikiran Islam di Malaysia : Sejarah dan Aliran", hal 33.

¹² Ibid, hal 35

berkuasa di semenanjung Melayu secara resmi menjadikan Islam sebagai hukum resmi kerajaan dengan tujuan menyatukan semua organisasi Islam di bawah birokrasi kerajaan.

Di bawah kolonialisasi Inggris, perkembangan Islam juga menjadi suatu hal yang menarik. Pada periode 1824 hingga 1957, Sultan-sultan di Malaya sebagai pemimpin dalam masalah budaya dan agama menjadi sekadar simbol tanpa memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan. Hal ini disebabkan adanya perubahan dari kebijakan pejabat pemerintahan Inggris di Malaysia yang pada awalnya bersifat 'nasihat' menjadi 'perintah' di setiap kondisi, termasuk yang berhubungan dengan Islam dan Melayu.¹³ Meskipun begitu, tidak terjadi tentangan dari masyarakat muslim dalam masalah ini. Hal ini disebabkan kemampuan pemerintah kolonial Inggris untuk mengendalikan masyarakat muslim Melayu sehingga penentangan terhadap kebijakan Inggris dapat diminimalisasi. Pemerintah Inggris tetap memberikan keleluasaan terhadap orang-orang Melayu untuk menjalankan Islam dan adat istiadat Melayu.

Setelah Perjanjian Pangkor ditandatangani antara Pemerintah kolonial Inggris dengan Kesultanan Perak pada 1874 dan segera menjadi model dari perjanjian-perjanjian berikutnya antara Inggris dengan kesultanan di semenanjung yang lain, pemerintah Inggris menetapkan pengangkatan setiap residen di kerajaan. Setiap sultan wajib meminta saran kepada residen dalam segala hal, kecuali dalam masalah agama dan adat. Kemudian, Pemerintah Kolonial Inggris juga mengeluarkan sebuah undang-undang keluarga yang dipengaruhi Islam. UU yang dinamakan *Mohammedan Law* ini merupakan kumpulan hukum yang sejenis dengan hukum yang berlaku di masyarakat Eropa namun telah disesuaikan dengan pendapat ulama. Pelaksanaan Mohammedan Law ini membutuhkan institusi mahkamah sehingga Inggris bersama para sultan Malaya kemudian menjadikan kadi pegawai resmi sebagai bagian dari pemerintahan modern yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan syariat Islam.¹⁴ Pengangkatan ini membuat Kadi mendapatkan gaji dari pemerintah.

¹³ Hussin Muthalib, *Islam in Malaysia : from Revivalism to Islamic State*, hal 20

¹⁴ Ahmad Ibrahim, *Islam di Asia Tenggara*, hal 328.

Pada abad ke-20, berkembang gerakan reformasi Islam di wilayah semenanjung. Gerakan reformasi Islam ini tidak terlepas dari adanya pengaruh gerakan pembaharuan Islam yang muncul di dunia sejak abad ke-19. Pengaruh Pan-Islamisme yang dimunculkan oleh Jamaludin Al-Afghani serta Muhammad Abduh¹⁵ mendapatkan sambutan dari tokoh Muslim Melayu seperti Muhammad Thahir Jalaluddin, Syekh Al-Hadi, serta Haji Abbas Mohammad Taha. Gerakan ini berkembang dengan dukungan dari pelajar-pelajar Malaya yang belajar di Al-Azhar Mesir serta siswa-siswa yang belajar pendidikan Arab di madrasah-madrasah yang banyak didirikan pada akhir abad ke-19.

Istilah Kaum Muda kemudian digunakan untuk menyebut para pembaharu yang mendukung gerakan reformasi dan segala bentuknya. Di sisi lain, muncul pula istilah Kaum Tua yang digunakan untuk menyebut orang-orang tradisional yang menolak reformasi dan bersikap mendukung semua hal yang bersifat tradisional, tidak berubah, dan mapan.¹⁶ Kaum Tua merupakan gabungan antara elit tradisional, ulama pedesaan, dan unsur-unsur yang sangat konservatif di dalam masyarakat Malaya.¹⁷

Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat muslim, para tokoh reformis ini bergerak melalui penerbitan majalah dan madrasah yang mengembangkan ilmu agama dan ilmu umum. Untuk mendukung gerakan reformasi yang diusung, tokoh-tokoh tersebut menerbitkan majalah yang dinamakan *Al-Imam* serta madrasah seperti *madrasah Al-Hadi* dan *madrasah Al-Mashor* yang didirikan antara tahun 1917 hingga 1918. Gerakan reformasi ini mendapatkan dukungan yang luas dari mahasiswa yang belajar di Al-Azhar serta keluarga Melayu yang tinggal di Mekkah.¹⁸

Dalam masalah agama, Kaum Muda banyak mengkritisi pemahaman fikih dari ulama tradisional Melayu. Mereka menolak penerapan mazhab tertentu di dalam masyarakat dan menyerukan agar masyarakat tidak serta mengikuti pendapat ulama yang tidak didasari dalil dan keterangan yang jelas. Pernyataan

¹⁵ NJ. Funston, *The Origins of PAS*, hal 59

¹⁶ William Roff, "Kaum Muda-Kaum Tua: Inovasi dan Reaksi di Kalangan Orang Melayu", dalam "Islam di Asia Tenggara", hal 255

¹⁷ Ibid, hal 259.

¹⁸ Muthalib, op. cit, hal 22

keras dikeluarkan oleh seorang tokoh reformis dari Negeri Sembilan bernama Hashim Abdul Ghani yang mengatakan bahwa menganut suatu mazhab tertentu adalah haram dan masyarakat wajib keluar dari mazhab.

Kemunculan gerakan reformis Islam di Malaysia pada akhir abad ke-19 bukan tanpa tentangan. Para ulama tradisional menolak pemikiran dari tokoh reformis seperti dari Muhammad Tahir Jalaludin maupun Za'ba. Sebagai contoh, Za'ba mengatakan bahwa Allah yang bersifat Maha Sempurna tidak patut menyesatkan manusia karena tindakan tersebut memperlihatkan kekurangan Tuhan. Selain itu, dalam mengupas masalah Qada dan Qadar, Za'ba menerjemahkan sebuah kitab Arab ke dalam bahasa Melayu dengan judul *Pendapatan Pembahasan Ulama Berkenan dengan Kadha dan Kadar*. Buku ini kemudian dilarang beredar. Keputusan pelarangan buku dikeluarkan oleh Mufti Perak.

Kemunculan kelompok reformis juga mendapat tentangan dari para sultan Melayu. Sebagai akibat dari feodalisme Melayu yang memberikan legitimasi kepada raja-raja Melayu untuk mengklaim diri mereka sebagai wakil Tuhan membuat raja-raja Melayu mendukung ulama tradisional yang mengajarkan agar rakyat Melayu tunduk setia kepada sultan. Durhaka¹⁹ kepada Sultan adalah dosa besar karena sama artinya dengan durhaka kepada Tuhan.

Selain itu, modernisasi ekonomi yang dilakukan pemerintah kolonial Inggris menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya upaya reformasi. Hal ini disebabkan karena tidak terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat, sebuah faktor yang dibutuhkan untuk mewujudkan gerakan reformasi. Modernisasi ekonomi yang dilakukan oleh Inggris secara luas hanya dinikmati oleh kelompok non-muslim, terutama etnis Cina. Inggris mengandalkan para imigran dari Cina dan India untuk mengembangkan sumber daya di semenanjung, sementara masyarakat Melayu yang dianggap oleh Inggris sebagai masyarakat pertanian tradisional tetap berada di wilayah pedesaan dan tidak merasakan dampak yang signifikan dari adanya kebijakan ekonomi Inggris. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan campur tangan di dalam urusan agama dan

¹⁹ Sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut pengkhianatan kepada Tuhan ataupun sultan.

menyerahkannya kepada para sultan Malaya membuat gerakan reformasi sulit berkembang. Hal ini diakibatkan karena pengangkatan para ulama-ulama tradisional menjadi petugas agama di dalam lembaga-lembaga keagamaan menjadikan lembaga keagamaan yang ada didominasi oleh kelompok tradisional yang menolak gerakan reformasi. Hambatan-hambatan yang terjadi membuat gerakan reformasi gagal dalam melakukan sebuah gerakan sosial yang lebih besar, seperti yang terjadi di Indonesia. Reformasi hanya menjadi sebuah gejala di perkotaan, sementara masyarakat Melayu yang didominasi kelompok masyarakat pedesaan tidak tersentuh dan meragukan ide-ide baru yang dibawa kelompok reformis.

Perubahan peta politik di wilayah Malaya dengan masuknya Jepang juga tidak membawa perubahan signifikan terhadap kemajuan kelompok reformis. Pemerintahan militer Jepang melakukan campur tangan di dalam seluruh kehidupan masyarakat Malaya, sebuah kebijakan yang sama sekali bertentangan dengan apa yang dilakukan sebelumnya oleh pemerintah Inggris. Meskipun demikian, dampak pendudukan Jepang atas kemungkinan kemunculan gerakan reformasi yang lebih besar tidak terwujud. Kedekatan antara penguasa tradisional dengan Jepang, sebuah hubungan yang sebelumnya lazim terjadi pada masa pemerintah kolonial Inggris, membuat kedudukan teguh para sultan dalam masalah keagamaan tetap bertahan.

II. 2. Pendirian Parti Islam Se-Malaysia (PAS)

Setelah Perang Dunia II berakhir, gerakan reformasi Islam semakin aktif menyentuh permasalahan politik. Pendirian madrasah yang menjadi tempat pengembangan aliran reformis turut menjadi faktor pendukung dalam pendirian partai politik Islam di Malaysia. Atas dasar dari inisiatif Abu Bakar al-Baqir serta Burhanudin al-Helmy dan dukungan dari *Parti Kebangsaan Melayu se-Malaya* (PKMM)²⁰, pada akhir Maret 1947 diselenggarakan *Persidangan Ekonomi-Agama se-Malaya* yang mengambil tempat di Madrasah *al-Ihya As-Sharif*.

²⁰ Keterlibatan PKM dalam konferensi ini tidak diperlihatkan secara nyata. Hal ini terlihat dari ketidakhadiran para pemimpin PKMM di dalam konferensi

Keterlibatan PKMM yang merupakan organisasi politik kiri memperlihatkan hubungan erat yang terjalin antara kelompok kiri dan kelompok reformasi agama sehingga banyak orang Melayu menganggap bahwa kelompok kiri yang berdiri bukan atas dasar agama sebagai bagian dari Kaum Muda.²¹ Meski jarang mendapatkan perhatian, namun keterlibatan tokoh-tokoh Islam reformis di dalam PKMM tidak dapat dikatakan nihil sama sekali.²²

Perkembangan gerakan politik Islam yang semakin kuat di Malaya setelah Perang Dunia II tidak terlepas dari perkembangan isu nasionalisme yang semakin kuat terasa, karena pada masa pendudukan Jepang, kelompok nasionalis di Malaya tidak dapat bergerak secara bebas akibat pengawasan yang sangat ketat dari pemerintah pendudukan Jepang. *Hizbul Muslimin* menjadi partai politik Islam pertama yang didirikan di Malaysia pada 14 Maret 1948. *Hizbul Muslimin* merupakan kelanjutan dari *MATA*. Pendirinya adalah Abu Bakar al-Baqir yang juga menjadi ketua dari Madrasah *al-Ihya as-Sharif*. Pendirian partai politik ini selain mengadopsi dari kata dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an²³ juga mendapatkan pengaruh dari Masyumi di Indonesia. Akan tetapi, perjalanan *Hizbul Muslimin* di dalam perpolitikan Malaysia tidak bertahan lama karena pada 18 Juni 1948 *Hizbul Muslimin* dibubarkan oleh pemerintah kolonial Inggris karena dianggap terlalu radikal dan dapat mengganggu kestabilan. Selain itu, tujuh pemimpin *Hizbul Muslimin* termasuk Abu Bakar al-Baqir ditahan oleh pemerintah kolonial Inggris.²⁴

Pembubaran *Hizbul Muslimin* pada tahun 1948 tidak membuat para tokoh muslim reformis meninggalkan dunia politik. Dibubarkannya *Hizbul Muslimin* membuat banyak anggotanya seperti Haji Ahmad Fuad Hasan, salah seorang lulusan Madrasah *al-Ihya as-Sharif* memilih untuk bergabung ke dalam UMNO yang didirikan pada 1946. Di dalam UMNO, Haji Ahmad Fuad Hasan diberi tugas sebagai ketua departemen Agama dan Pendidikan UMNO. Haji Ahmad Fuad Hasan menganggap bahwa peranan ulama di Malaya telah mengalami penurunan

²¹ Roff, Loc. Cit, hal 267

²² Funston, Loc. cit., hal 64

²³ Penamaan *Hizbul Muslimin* didasarkan pada kata 'Hizbullah' yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 (QS 58:22)

²⁴ Funston, Loc.cit, hal 67

karena tidak ada persatuan ulama di Malaya hingga peranan ulama disamakan dengan ‘sampah yang tidak dihargai karena tiada kekuatan’.²⁵

Permasalahan ini diangkat dalam pertemuan ulama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama UMNO pada bulan Agustus 1951. Dalam pertemuan puncak pada tanggal 23 Agustus, disepakati pendirian organisasi ulama yang dinamakan *Persatuan Ulamak Se-Malaya*. Para ulama juga menyepakati untuk membentuk organisasi politik yang berdiri sendiri dan terpisah dari UMNO. Keinginan pemisahan ini dirasa penting untuk dilaksanakan karena ulama menganggap sebuah organisasi yang berlandaskan Islam tidak akan bisa bergerak jika berada di dalam organisasi yang tidak berlandaskan pada Islam pula. Alasan berikutnya adalah ketidaksenangan para ulama yang menganggap UMNO membiarkan banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam masalah yang berkaitan dengan Islam. Permasalahan pemurtadan yang banyak terjadi serta judi lotere yang dianjurkan oleh UMNO mendapatkan kecaman dari mufti Pulau Penang, Syekh Abdullah Fahim hingga keluar fatwa pengharaman judi lotere.

Othman Hamzah, salah seorang ulama mengusulkan agar dibentuk partai politik baru yang didasarkan pada Islam. ide ini diikuti dengan usulan yang sama oleh Abdullah Hamid al-Idrus. Selanjutnya, seorang ulama asal Sebrang Prai bernama Haji Ahmad Badawi mengeluarkan manifesto yang dinamakan ‘Manifesto Al-Badawi’ berjudul ‘*Ulamak ke jalan Allah*’. Manifesto ini dikeluarkan untuk mendukung pendirian partai politik Islam. Upaya pembentukan partai politik Islam pada akhirnya terjadi pada tanggal 24 November 1951 di Bukit Mertajam, Penang ketika Persatuan Ulamak se-Malaya berganti nama menjadi Persatuan Islam se-Malaya atau lebih dikenal dengan nama *Parti Islam se-Malaya* (PAS) dengan Presiden pertamanya adalah Haji Ahmad Fuad Hasan. AD/ART menjelaskan bahwa sikap mereka sebagai partai politik adalah membela kepentingan-kepentingan umat Islam dan menjalin hubungan baik dengan organisasi politik lain yang tidak menentang Islam.

²⁵ Jabatan Arkib PAS Pusat, Sejarah Parti Islam Se-Malaysia, hal 1

Haji Ahmad Fuad Hasan hanya menjabat hingga akhir 1953 karena memutuskan untuk mengundurkan diri. Pengunduran diri Presiden PAS tersebut didasari perbedaan pandangan di dalam tubuh PAS dalam menyikapi dukungan terhadap persatuan yang dibentuk dalam upaya mencapai kemerdekaan Malaya. Haji Ahmad lebih menginginkan PAS bergabung ke dalam *National Conference* yang dibentuk oleh Ketua UMNO, Dato' Onn Jaafar. Sementara elit PAS yang lain di bawah pimpinan Haji Ahmad Badawi memilih untuk bergabung dengan *National Convention* pimpinan Tunku Abdul Rahman Putra yang lebih radikal. Perselisihan ini diakhiri ketika PAS memutuskan untuk tidak terikat dan memihak antara dua organisasi tersebut. Sebagai pengganti Haji Ahmad Fuad Hasan, diangkat Haji Abbas Alias pada November 1953.

Tahun 1953 merupakan tahun dimana dilakukan perubahan di dalam AD/ART PAS. Dalam AD/ART yang baru disepakati beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai sasaran dari upaya kemerdekaan yang ingin dicapai PAS. Hal kedua adalah penegasan sikap PAS dalam menjamin penerapan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan masyarakat dan pembentukan pemerintahan yang menjalankan hukum Islam. Salah satu hal yang diinginkan PAS adalah ditetapkannya Kementerian Agama di Malaya. Namun, hal yang paling penting di dalam perubahan AD/ART PAS adalah dikeluarkannya larangan bagi anggota komite eksekutif PAS untuk menjadi anggota komite eksekutif di partai lain. Larangan ini membuat pejabat PAS tidak lagi bisa melakukan rangkap jabatan seperti yang terjadi pada awal pembentukan PAS.

Burhanudin al-Helmy yang sebelumnya aktif di dalam PKMM dan pernah menjadi pemimpin *Parti Rakyat Malaya* diangkat menjadi Presiden PAS pada 25 Desember 1956 atau hanya 10 hari semenjak memutuskan untuk bergabung dengan PAS. Di dalam pidatonya, ia menegaskan perjuangan PAS dalam penegakan Islam di Malaya. Ia berkata :

”Dalam perjuangan kita (PAS) bagi mencapai kemerdekaan, kita telah dan terus menerus memperjuangkan Melayu itu sebagai kebangsaan bagi negara Tanah Melayu ini dengan bertapak di atas asas ideologi Islam yang maha suci”

Bergabungnya tokoh ini menandai era baru di dalam kepemimpinan PAS. Jika dari tahun 1951 hingga 1956 kepemimpinan PAS diwakili oleh para ulama tradisional, maka ketika Burhanudin al-Helmy diangkat menjadi Presiden hingga tahun 1969, PAS memasuki era dimana kepemimpinannya dianggap sebagai kepemimpinan nasionalis kiri.²⁶ Anggapan ini muncul dari kenyataan bahwa bergabungnya Burhanudin al-Helmy memperlihatkan bagaimana kelompok kiri mampu bekerja sama dengan kelompok reformis Islam di dalam masalah politik.

Burhanudin al-Helmy berhasil membawa perubahan yang signifikan di dalam tubuh partai. Dia membuat ulang konsep negara Malaya menurut PAS menjadi Negara Melayu yang berlandaskan pada Islam dan menolak pemisahan antara agama dan Negara. Di bawah kepemimpinannya, ia berhasil membawa PAS menjadi partai besar dan memenangkan pemilu tahun 1959 di dua Negara bagian, yakni Kelantan dan Trengganu.

II. 3. Pembentukan PAS di Kelantan

Kelantan, sebuah Negara bagian yang terletak di utara semenanjung Melayu adalah wilayah dengan populasi Melayu terbesar di antara negeri semenanjung lainnya dan bersama Trengganu, menjadi pusat dari penyebaran Islam di Malaysia. Munculnya Kelantan sebagai pusat penyebaran Islam dimungkinkan dengan banyaknya *Pondok* yang lahir pada abad ke-19. Pendirian Majelis Agama dan Istiadat Melayu(MAI) di Kelantan pada 1915 yang kemudian menyebar ke wilayah Negara bagian lain di Malaysia makin menegaskan posisi Kelantan sebagai pusat penyebaran Islam.

Pondok memiliki kontribusi penting dalam perkembangan Islam di Kelantan, terutama pada masa kolonial dan sebelum kemerdekaan. Banyak lulusan *Pondok* yang menjabat di Departemen Agama, baik sebagai mufti, kadi, maupun nazir²⁷. Hal ini memudahkan pendirian PAS di Kelantan. sebagai partai berazaskan Islam, PAS banyak mendapatkan dukungan dari *Tok Guru*. Pengaruh kuat dari para *Tok*

²⁶ Mohammad Fadli Ghani, Arkib resmi PAS pusat.

²⁷ Pengawas sekolah agama

Guru mendorong masyarakat Kelantan turut memberikan dukungan terhadap pendirian PAS Kelantan.

Pendirian PAS di daerah Kelantan juga sangat terikat dengan beberapa organisasi yang telah berdiri sebelum Perang Dunia II berlangsung. Beberapa diantaranya adalah *Parti Kebangsaan Melayu se-Malaya* (PKMM) dan *Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan* (PPMK) yang didirikan pada 9 Februari 1940. Selain itu, juga terdapat organisasi pemuda bernama *Pertubuhan Pemimpin Remaja* (PERUPA).²⁸ Keterikatan PAS dengan organisasi tersebut terlihat dengan bergabungnya tokoh-tokoh PKMM, PPMK, dan PERUPA ke dalam PAS setelah Perang Dunia II.

Beberapa tokoh yang dapat disebut antara lain adalah Mohammad Asri yang meninggalkan PPMK pada tahun 1947 karena menganggap elit PPMK menjalin hubungan yang erat dengan elit Kelantan memutuskan untuk bergabung dengan Angkatan Pemuda Insaf (API), sebuah organisasi pemuda terbesar di Kelantan.²⁹ Ia memutuskan untuk meninggalkan Kelantan menuju Gunung Semanggol pada 1948 karena khawatir akan ditahan oleh pihak pemerintah Inggris. Mohammad Asri kembali ke Kelantan pada 1954 dan memutuskan untuk bergabung dengan PAS. Sementara itu, terdapat pula tokoh lain bernama Khaidir Khatib yang meninggalkan Kelantan pada 1948 dan memutuskan bergabung dengan *Hizbul Muslimin*. Ia kembali ke Kelantan pada 1951 dan bergabung dengan PAS di tahun yang sama.

Pendirian pertama PAS di Kelantan dilakukan di Pasir Mas pada 23 Juli 1953. Pendirian ranting pertama PAS di Pasir Mas dimungkinkan karena di daerah tersebut banyak terdapat *Pondok* yang menjadi pusat penyebaran Islam. tokoh yang memiliki andil dalam pendirian PAS adalah Amaludin Darus, Omar bin Yusuf, serta Badullah Ahmad. Pendirian ranting pertama PAS ini kemudian diikuti dengan pembukaan yang kedua di Machang pada 21 September 1953 yang dilakukan oleh Muhammad Nor bin Haji Yusoff dan diikuti dengan pendirian ranting berikutnya di Tanah Merah dan Pasir Puteh.

²⁸ Khoo Kay Khim, *Islam and Politics in Kelantan*, hal. 5

²⁹ *Ibid.*

Kembalinya Mohammad Asri pada 1954 memberikan pengaruh yang signifikan dalam pendirian PAS di Kelantan. Mohammad Asri yang sebelumnya bergabung dalam API yang merupakan organisasi kiri memutuskan bergabung dengan PAS. PAS berkembang dengan pesat sejak 1954. Perkembangan ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah kenyataan bahwa kemampuan Mohammad Asri membangkitkan semangat nasionalisme dan memadukannya dengan politik Islam merupakan hal yang baru yang menarik minat masyarakat. Kemampuan ini didapatkan Asri ketika bergabung dengan API. Faktor kedua adalah dukungan yang meluas dari ulama-ulama Kelantan terhadap PAS. Sejak 1954, para ulama mendukung usaha Mohammad Asri untuk mendirikan cabang PAS di Kelantan. Seorang ulama bernama Haji Abdullah Tahir menjadi salah satu ulama *Pondok* yang memberikan dukungan terhadap Mohammad Asri dan PAS. Di Pasir Puteh, seorang ulama bernama Haji Adam Kamil menjadi tokoh pendiri. Selepas tahun 1954, didirikan tiga ranting baru PAS, masing-masing di Bachok (1956), Kuala Krai (1958), dan Tumpat (1959).³⁰ Mohammad Asri diangkat menjadi pejabat PAS untuk wilayah Kelantan dan Trengganu.

³⁰ www.kelantan.pas.org.my, sejarah 50 tahun PAS Kelantan, hal. 3

BAB III
PERMASALAHAN PARTI ISLAM SE-MALAYSIA DALAM POLITIK
MALAYSIA

III. 1 Keikutsertaan PAS dalam Pemilu 1955 dan 1959

Sistem politik yang diterapkan di Semenanjung Melayu memungkinkan dibentuknya banyak partai. Hal ini terlihat pada pemilu 1955 saat Federasi Malaya belum terbentuk dan pemilu setelahnya, pemilu yang dilaksanakan diikuti oleh banyak partai. Hanya saja, sistem politik yang terbentuk adalah sistem politik etnis. Artinya, partai politik yang dibentuk didasarkan pada etnis-etnis tertentu. UMNO sebagai partai Melayu menyadari permasalahan ini sehingga membentuk koalisi dengan *Malayan Indian Congress* (MIC) yang merupakan partai etnis India dan *Malayan Chinese Association* (MCA) yang merepresentasikan etnis Cina.³¹ UMNO berkeyakinan, pemerintahan yang kuat hanya dapat diberlakukan jika prinsip komunal diterapkan di Federasi Malaya.

Sementara itu, peralihan kepemimpinan PAS pada tahun 1953 yang ditandai dengan pengunduran diri Haji Ahmad Fuad Hasan dan digantikan oleh Haji Abbas Alias menandakan sebuah era baru di dalam tubuh PAS. Dilakukan reorganisasi partai yang bertujuan untuk memperjelas arah kebijakan PAS di dalam politik dalam negeri Malaysia. Dalam sebuah pertemuan tahunan yang dilakukan pada bulan Agustus 1953, dicapai kesepakatan untuk menjamin terciptanya sebuah masyarakat dan pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Keikutsertaan PAS dalam pemilihan umum di Malaya dimulai pada tahun 1955, saat dimana Malaya belum menjadi sebuah Negara merdeka. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih calon anggota parlemen dan anggota Negara bagian. Dalam pemilu 1955, Aliansi yang didukung oleh UMNO, MIC, dan MCA berhasil memenangkan 51 dari 52 kursi pemilihan parlemen. Satu-satunya kursi yang lepas berhasil dimenangkan oleh PAS di wilayah Perak.

³¹ Prasetya Utama, Proses Demokratisasi di Malaysia

Pemilu 1955 memperlihatkan sebuah kenyataan bahwa dari semua kontestan pemilu, hanya Aliansi yang mampu mengorganisasi keikutsertaan mereka di pemilu dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kesiapan Aliansi untuk mendaftarkan calonnya dalam perebutan semua kursi di parlemen dan Negara bagian, sementara dari partai lain, hanya *Parti Negara* yang dipimpin oleh Dato Oon Jaafar yang mampu untuk mendaftarkan 30 orang calonnya untuk bersaing dalam perebutan kursi parlemen. Sementara itu, PAS hanya mendaftarkan 11 orang calonnya dengan distribusi tiga orang mengikuti pemilihan di Kelantan, tiga di Perak, dua di Selangor, dan masing-masing satu orang di Kedah, Pahang, dan Penang. Sementara itu, partai-partai lain seperti *Asosiasi Nasional Perak (NAP)*, *Parti Liga Melayu Perak (PML)* menghilang setelah Pemilu 1955 dan Partai Buruh memilih untuk bergabung dengan *Parti Ra'ayat*³² dan membentuk Front Sosialis.

Tabel III.1

perolehan suara partai-partai politik dan kandidat independen pada Pemilu 1955

Negara Bagian	Perolehan suara partai dan independen					Tidak sah	total pemilih
	Aliansi	Parti Negara	PAS	Partai Buruh	Independen		
Kedah	155.151	7.692	1.563	-	2.817	3.201	170.424
Perlis	17.769	-	-	-	8.814	590	27.173
Penang	37.815	-	3.523	2.650	3.354	749	48.091
Perak	115.033	-	13.694	1.118	5.699	5.322	168.376
Selangor	50.178	11.796	6.489	1.018	1.003	1.429	71.913
Malaka	43.894	2.821	-	-	3.194	976	50.885
Negeri sembilan	41.656	7.468	-	-	506	903	50.533
Johor	121.648	19.433	-	-	253	2.900	144.234
Trengganu	57.424	10.240	-	-	-	3.016	70.680
Kelantan	130.513	20.459	13.399	-	2.758	5.466	172.595
Pahang	46.932	-	1.999	-	3.244	1.171	53.346
total	818.013	79.909	40.667	4.786	31.642	25.723	1.028.250

³² TE. Smith, 'The Malayan Elections of 1959', jurnal *Pacific Affairs* Vol. 33 No. 1 (1960), hal 39.

Sumber : TE. Smith, The Malayan Elections of 1959, jurnal Pasific Affairs, vol 33 No.1, 1960, hal 40

Hasil yang kurang menggembirakan dalam Pemilu 1955 dengan hanya mendapatkan satu kursi membuat PAS melakukan reorganisasi partai. Hal yang paling mencolok dalam perubahan partai adalah diangkatnya seorang tokoh nasionalis, Burhanuddin al-Helmy menjadi Presiden PAS pada Desember 1956. Pengangkatan Burhanuddin al-Helmy menjadi presiden PAS menegaskan kembali arah perjuangan yang akan ditempuh PAS dalam politik Malaysia pasca kemerdekaan. Menurut Burhanuddin al-Helmy, kemerdekaan yang ingin dicapai Malaya belum jelas dan mengabaikan aspek kebangsaan Melayu dan kejayaan Islam³³.

Kemerdekaan yang diperoleh Federasi Malaya pada 31 Agustus 1957 tidaklah terlalu memperlihatkan perbedaan berarti dalam kehidupan politik. Konstitusi yang disahkan pada hari kemerdekaan merupakan sebuah hasil kerja dari komisi konstitusi yang dikepalai oleh Lord Reid dan merupakan hasil dari perjanjian London antara pemerintah Inggris dengan konferensi Raja-raja Melayu dan wakil dari partai politik utama di Malaya (UMNO, MCA, MIC).³⁴ Di dalam konstitusi, dinyatakan secara jelas mengenai kedudukan agama Islam dan keistimewaan orang Melayu. Pasal 3 dalam konstitusi dinyatakan bahwa :

“ Islam is the religion of the Federation; but other religions may be practiced in peace and harmony in any part of Federation.”

Dari bunyi pasal 3 tersebut, terlihat secara jelas bahwa Islam menjadi agama Negara atau dengan menggunakan istilah lain, menjadi sebuah agama resmi di Malaysia.³⁵

Pemilu 1959 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah pemilih, terutama pemilih yang berasal dari etnis Cina dan India. Jika pada pemilu 1955 pemilih berjumlah 1.280.000 jiwa, maka pada pemilu 1959

³³ Jabatan Arkib PAS Pusat, Loc.cit, hal 2

³⁴ Effendy Choirie, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB*,(Jakarta : Pensil-324, 2008), hal 49

³⁵ Ibid, hal 50

meningkat menjadi 2.177.000 pemilih. Peningkatan yang paling mencolok terjadi pada etnis Cina. Peningkatan terjadi karena konstitusi yang digunakan sejak kemerdekaan 1957 memudahkan warga keturunan India dan Cina untuk menjadi warga Negara Federasi Malaya melalui jalur naturalisasi.³⁶ Tercatat lebih dari 750.000 jiwa etnis Cina terdaftar sebagai pemilih dari sebelumnya hanya 150.000 pada pemilu 1955.

Untuk menghadapi pemilu 1959, Aliansi yang terdiri dari UMNO, MCA, dan MIC pada awalnya menempatkan 104 kandidat yang terdiri dari 75 wakil etnis Melayu, 27 wakil etnis Cina, dan 2 wakil etnis India, susunan yang tidak disepakati oleh MCA. MCA menghendaki agar setidaknya terdapat 35 wakil bagi etnis Cina. Pada akhirnya, disepakati bahwa susunan kandidat Aliansi terdiri atas 69 wakil Melayu, 31 wakil Cina, dan 4 wakil India. Meskipun demikian, susunan akhir inipun tidak sepenuhnya disepakati oleh MCA sehingga menyebabkan beberapa anggota MCA memutuskan untuk keluar dari Aliansi dan memilih untuk menempuh jalur independen dan menjadi oposisi bagi Aliansi.

Permasalahan yang dihadapi oleh Aliansi dalam menghadapi pemilu 1959 tidak hanya sebatas pada ketimpangan jumlah pembagian kandidat, melainkan juga mencakup keinginan etnis minoritas untuk mendapatkan kebebasan hidup yang lebih luas. Para wakil MCA menuntut kepada Aliansi yang didominasi oleh Melayu agar menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa resmi selain bahasa Inggris dan Melayu. Keinginan ini mendapatkan tentangan dari warga Melayu yang menganggap bahwa konstitusi baru yang memberikan kemudahan kepada warga minoritas sebagai hal yang 'tidak perlu, salah, dan mengancam kepentingan warga Melayu'.³⁷ Permasalahan yang dihadapi oleh Aliansi memberikan keuntungan kepada partai-partai lain diluar Aliansi. Pada Pemilu 1959, Aliansi tidak hanya mendapatkan tantangan dari *Parti Negara* dan PAS, melainkan juga dari kelompok kiri, termasuk dari *People's Progressive Party* (PPP).

Sementara itu, di dalam ideologi PAS ditekankan mengenai aspek nasionalisme bangsa Melayu. Ada lima aspek yang ingin dicapai PAS. Aspek

³⁶ TE. Smith, Loc.cit, hal 40

³⁷ Joseph Chin Yong Liow, Contextualising Political Islam and the PAS Challenge in Malaysian Politic, hal 362.

pertama adalah Negara Malaya harus dijalankan oleh bangsa Melayu. Kedua, etnis Melayu harus mendapatkan keistimewaan daripada etnis yang lain. Ketiga, konstitusi Malaya harus menjamin kepentingan etnis Melayu dan mendahulukan kepentingan etnis Melayu jika terjadi benturan dengan etnis lain. Keempat, Islam harus menjadi agama resmi Negara. Terakhir, Bahasa Melayu harus menjadi bahasa resmi di Malaya.³⁸ Dari penekanan di atas, terlihat bahwa tujuan utama PAS di dalam politik Malaysia adalah kebangsaan Melayu dan pendirian Negara Islam.³⁹ PAS juga berkomitmen untuk menjalin kerjasama dengan semua Negara Islam di dunia.⁴⁰

Dalam menghadapi pemilu 1959, PAS menjalin kerjasama dengan para ulama Melayu untuk memenangkan Pemilu. Dalam kampanyenya, PAS mengangkat isu tentang Melayu dan agama sebagai isu politik dalam menghadapi kekuatan Aliansi. PAS menyuarakan ide 'Malaya untuk orang-orang Melayu' dan berjanji akan melakukan perubahan konstitusi jika berhasil memenangkan pemilu 1959. PAS menjanjikan adanya sebuah Negara yang berazaskan pada prinsip-prinsip keislaman. Kampanye yang dilakukan oleh PAS secara langsung menyerang kampanye yang dilakukan oleh Aliansi yang menjanjikan pembentukan sebuah pemerintahan yang menghormati prinsip-prinsip komunal.

Dalam pemilihan Negara bagian yang diselenggarakan sebelum pemilihan parlemen, PAS berhasil meraih kemenangan mutlak di wilayah pantai timur, yakni di Kelantan dan Trengganu. Di Kelantan, PAS berhasil meraih 28 kursi dari 30 kursi yang diperebutkan. Sisa dua kursi menjadi milik Aliansi, yakni satu untuk UMNO dan satu untuk MCA. Di Trengganu, PAS berhasil mendapatkan 13 kursi dari 27 kursi, sementara Aliansi hanya mendapatkan tujuh (lima untuk UMNO dan dua untuk MCA), sedangkan sisanya untuk *Parti Negara*.⁴¹ Perolehan kursi yang besar membuat PAS berhak untuk menjalankan pemerintahan di Kelantan dan Trengganu. Di sisi lain, kemenangan PAS ini memperlihatkan kenyataan bahwa terjadi penurunan suara yang sangat drastis yang dialami oleh

³⁸ Ibrahim Abu Bakar, *PAS and Its Islamist Fundamentalism in Malaysia*, hal 5-6

³⁹ *Ibid*, hal 6

⁴⁰ TE. Smith, *loc.cit*, hal 43

⁴¹ Roger Kershaw, *The 'East Coast' in Malayan Politics*, hal 518

Aliansi di pesisir timur Malaya. Sebagai perbandingan, pada pemilu Negara bagian Kelantan pada September 1955, Aliansi berhasil memenangkan delapan dari 16 kursi yang diperebutkan di Kelantan. Sementara itu, pada pemilu Negara bagian Trengganu yang dilaksanakan pada Oktober 1954, Aliansi berhasil meraih 13 kursi dari 15 kursi yang diperebutkan. Dengan perolehan kursi yang menurun membuat Aliansi harus menyerahkan kepemimpinan Kelantan dan Trengganu kepada PAS. Secara keseluruhan, Aliansi meraih 207 kursi, PAS mendapatkan 42 kursi, serta kelompok sosialis mendapatkan 16 kursi.

Selanjutnya, dalam pemilihan parlemen yang diselenggarakan pada 19 Agustus 1959, keberhasilan PAS memenangkan pemilihan Negara bagian di Kelantan dan Trengganu berbanding lurus dengan hasil pemilu parlemen. Sebanyak 13 kursi dari 16 kursi berhasil diraih PAS di dua Negara bagian tersebut. Sementara itu, Aliansi memenangkan seluruh kursi parlemen di Kedah, Perlis, Johor, dan Pahang. Di Negeri Sembilan, Aliansi memenangkan empat kursi dari enam yang diperebutkan, sementara dua lainnya diraih calon independen. Front Sosialis meraih lima dari 14 kursi yang diperebutkan di Selangor dan tiga dari delapan kursi di Penang. *Parti Negara* yang dipimpin Dato' Oon Jaafar hanya meraih satu kursi di Trengganu, dan *Parti Malaya* meraih satu kursi di Malaka. *People's Progressive Party* (PPP) meraih empat dari 20 kursi di Perak yang merupakan Negara bagian terbesar. Secara total, dari 104 kursi yang diperebutkan, Aliansi meraih 73 kursi dengan pembagian 52 kandidat dari UMNO, 19 dari MCA, dan 3 dari MIC. PAS mendapatkan 13 kursi, PPP empat kursi, *Parti Negara* satu kursi, *Parti Malaya* satu kursi, Front Sosialis delapan kursi, sedangkan sisanya diraih oleh kandidat independen. Dari sisi Aliansi, meski dari segi perolehan suara mengalami peningkatan dari pemilu 1955, namun dari segi persentase perolehan suara mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini disebabkan karena kemenangan PAS di Kelantan dan Trengganu. Jika pada pemilu 1955 perolehan Aliansi mencapai 80 %, maka pada pemilu 1959, perolehannya hanya mencapai 51,5 %.⁴²

⁴² TE. Smith, Loc.cit, hal 42

Keberhasilan PAS memenangkan mayoritas kursi di Kelantan dan Trengganu disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah penolakan etnis Melayu tradisional di Kelantan dan Trengganu atas posisi etnis Cina yang dirasa terlalu kuat dan mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah. Hal ini didasari pada kebijakan pemerintah yang menerapkan kebijakan persamaan bagi semua etnis, hal yang ditolak oleh PAS sehingga PAS menyerukan kampanye 'Malaya untuk Melayu'. Kampanye PAS ini mendapatkan sambutan hangat masyarakat Kelantan dan Trengganu. Faktor berikutnya adalah kuatnya dukungan ulama tradisional di kedua Negara bagian tersebut. Kondisi sosial masyarakat Kelantan dan Trengganu yang bersifat tradisional dan kental dengan nilai-nilai keislaman membuat posisi ulama di dalam masyarakat menjadi kuat, sehingga apa yang dijalankan dan diperintahkan para ulama juga diikuti oleh masyarakat. Para ulama di Kelantan dan Trengganu-lah yang menggerakkan masyarakat untuk memilih PAS dalam pemilu 1959.⁴³

⁴³ Roger Kershaw, loc. cit, hal 520

Tabel III.2.

Perolehan suara partai politik dan kandidat independen pada Pemilu Negara
Bagian 1959

Negara Bagian	Perolehan suara partai dan independen						
	Aliansi	Parti Negara	PAS	Partai Malaya	Independen	PPP	SF
Kedah	138.560	3.666	45.979	-	512	-	6.046
Perlis	19.521	-	9.697	-	978	-	393
Penang	67.918	1.124	10.772	-	6.518	7.612	39.069
Perak	165.792	-	46.280	-	5.753	73.792	11.731
Selangor	105.134	3.742	21.273	2.567	10.476	7.177	32.296
Malaka	48.390	-	10.464	4.993	238	-	8.215
Negeri sembilan	48.493	3.438	9.941	-	9.499	-	15.513
Johor	140.217	32.287	5.471	-	10.755	-	20.408
Trengganu	28.006	12.846	29.125	-	2.793	-	6.404
Kelantan	48.509	9.371	114.858	-	3.256	-	4.071
Pahang	51.366	-	18.165	-	5.049	-	6.172
total	861.906	66.474	322.025	7.560	55.827	88.581	150.318

Keterangan:

total suara tidak sah: 40.015 suara

total pemilih yang menggunakan hak suara: 1.592.706 jiwa

total seluruh pemilih: 2.151.720 jiwa

sumber : TE. Smith, The Malayan Elections of 1959, jurnal Pacific Affairs, vol 33 No.1, 1960,
hal 45

Tabel III.3

perolehan suara partai politik dan independen pada Pemilu Parlemen 1959

Negara Bagian	Perolehan suara partai dan independen						
	Aliansi	Parti Negara	PAS	Partai Malaya	Independen	PPP	SF
Kedah	116.694	-	47.800	-	1.605	-	12.908
Perlis	17.653	-	11.950	-	-	-	-
Penang	60.249	-	14.829	-	5.569	3.899	52.237
Perak	154.056	-	47.757	-	16.296	83.509	8.862
Selangor	87.577	-	15.691	4.008	22.477	7.821	59.987
Malaka	44.186	-	12.133	9.396	265	-	8.684
Negeri sembilan	37.651	4.369	12.103	-	10.607	-	7.934
Johor	140.219	19.931	4.992	-	15.878	2.162	30.311
Trengga- nu	25.237	7.986	32.124	-	1.497	-	595
Kelantan	53.382	292	116.087	-	-	-	-
Pahang	52.826	-	9.169	-	-	-	16.936
total	789.730	32.578	324.635	13.404	74.194	97.391	198.454

Keterangan:

Total suara tidak sah: 17.083 suara

Total pemilih yang menggunakan hak suara: 1.547.469

Total seluruh pemilih: 2.110.495

Sumber: TE. Smith, The Malayan Elections of 1959, jurnal Pasific Affairs, vol 33 No.1, 1960, hal 45

III. 2. Kebijakan PAS di Kelantan hingga Pemilu 1969

Dalam rangka menjalankan pemerintahan di Kelantan dan Trengganu, PAS menunjuk Ishak Lotfi Omar di Kelantan dan Mohammad Daud Abdul Somad di Trengganu sebagai menteri besar. PAS mulai memberlakukan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada syariat Islam. Dalam masalah pajak, PAS menolak untuk mengambil pajak dari kedai minuman keras. Pertunjukan teater,

tarian-tarian yang dipertontonkan secara umum serta taman hiburan juga dilarang dan ditutup. Sementara itu, praktik-praktik keagamaan diatur secara khusus oleh pemerintah. Kebijakan PAS yang menolak untuk mengambil pajak dari kedai minuman keras, bagaimanapun juga membuat anggaran Negara bagian mengalami defisit.⁴⁴

Kebijakan PAS ini ditentang oleh pihak lain, seperti PPP, kelompok sosialis dan Aliansi. Penentangan terhadap kebijakan yang diambil PAS kemudian melahirkan beberapa tuduhan. Kelompok penentang PAS menuding bahwa PAS menggunakan para pemimpin agama sebagai kandidat dan penggerak partai dalam upaya mendapatkan suara pemilih. Tuduhan ini didasari pada kenyataan bahwa perolehan suara yang diperoleh PAS dari kandidat selain golongan ulama sedikit.⁴⁵ Selain itu, mereka juga menuding PAS memanfaatkan para pemilihnya untuk menekan dan menyerang anggota dari partai lain. PAS menjawab semua tuduhan itu dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat atas tuduhan yang dilemparkan oleh kelompok penentang PAS.

Kuatnya tekanan yang diterima PAS mengakibatkan munculnya masalah di daerah Trengganu pada tahun 1961. Mundurnya pemimpin Negara bagian yang memilih menjadi calon independen pada pertengahan 1960 membuat posisi kursi di Negara bagian menjadi seimbang, yakni sebanyak 12 kursi milik PAS berbanding 12 kursi milik partai lain. Permasalahan yang dialami PAS memuncak saat empat anggota Partai Negara dan dua anggota PAS bergabung ke dalam Aliansi. Dengan bergabungnya anggota Partai Negara dan PAS ke dalam Aliansi, membuat PAS harus kehilangan kekuasaannya. Kejatuhan PAS di Trengganu semakin terlihat dalam pemilihan Negara bagian 1964. PAS hanya mendapatkan 3 kursi, sementara Aliansi berhasil mendapatkan 21 kursi dengan pembagian UMNO meraih 20 kursi dan MCA satu kursi.

Berbeda dengan apa yang terjadi di Trengganu, kekuasaan PAS di wilayah Kelantan dapat dipertahankan berkat kesolidan diantara para pemimpin Negara bagian PAS dalam menghadapi tekanan yang diberikan oleh para pesaingnya,

⁴⁴ Fred R. von der Mehden, *Religion and Politics in Malaya*, *Asian Survey*, vol 3, no. 12 (1963), hal 611

⁴⁵ *Ibid*, hal 612

terutama dari Aliansi. Penolakan PAS dalam upaya kerjasama dengan Otoritas Federasi yang menangani masalah pembangunan daerah menjadi sasaran Aliansi untuk mengalahkan PAS dalam Pemilu 1964. Aliansi menjanjikan pembangunan dalam skala yang besar kepada masyarakat Kelantan jika Aliansi memenangkan pemilihan Negara bagian 1964. Selain mengkampanyekan janji pembangunan kepada masyarakat Kelantan, Aliansi juga melakukan perubahan dalam posisi kandidatnya dengan memasukkan orang-orang yang memiliki reputasi baik menggantikan calon terdahulu. Sebagai contoh, dalam pemilihan di daerah Pasir Puteh, seorang tokoh yang memiliki reputasi buruk saat menjabat sebagai konselor digantikan oleh seorang mantan inspektur sekolah. Namun, hal ini tidak juga memberikan hasil yang memuaskan kepada Aliansi. Dalam Pemilu Negara bagian 1964, Aliansi hanya mendapatkan Sembilan kursi dengan rincian delapan UMNO dan satu MCA. PAS berhasil mendapatkan 21 kursi, sehingga membuat kekuasaan PAS di Kelantan dapat diteruskan. Secara keseluruhan, Aliansi meraih 89 kursi dengan pembagian kandidat UMNO meraih 59 kursi, MCA meraih 27 kursi, dan MIC tiga kursi. PAS meraih 9 kursi, Kelompok Sosialis dan PPP masing-masing dua kursi, *United Democratic Party* (UDP) meraih satu kursi, serta *People Action Party* (PAP)⁴⁶ juga meraih satu kursi.

Dalam tingkat nasional, PAS sering mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Salah satu kritik ditujukan pada kebijakan pemerintah yang tidak menjadikan hari jumat sebagai hari libur. PAS juga menyerang penggunaan dana dari pajak judi yang digunakan untuk pembangunan di Malaysia. Tunku Abdul Rahman menjawab tuduhan PAS dengan mengatakan bahwa Negara akan mengalami kerugian besar sebesar US\$ 1.000.000 jika menjadikan hari jumat sebagai hari libur.⁴⁷ Tunku juga menegaskan, mustahil untuk menerapkan semua hukum Islam dalam menjalankan pemerintahan di Malaysia. Aliansi kemudian membalas kritik PAS dengan mengatakan bahwa PAS tidak konsisten dengan kritiknya karena tetap

⁴⁶ People Action Party merupakan Partai yang berkuasa di Singapura setelah pemisahan diri Singapura dari Federasi Malaysia di tahun 1965. Pemisahan Singapura sendiri didorong oleh ketakutan etnis Melayu terhadap dominasi etnis Cina yang secara jumlah bertambah dengan bergabungnya Singapura ke dalam Federasi Malaysia.

⁴⁷ Fred R. von der Mehden, Loc.cit, hal 613

menarik pajak terhadap umat Islam dan memperbolehkan berdirinya bank konvensional, dua hal yang bertentangan di dalam Islam.⁴⁸

III. 3. Krisis Etnis 1969 dan Pembentukan Koalisi PAS-Aliansi ke dalam Barisan Nasional

Democratic Action Party (DAP), sebuah partai yang didirikan oleh satu-satunya wakil PAP di parlemen saat Singapura bergabung ke dalam Federasi Malaysia, Devan Nair, pada tahun 1966 memberikan sebuah warna baru di dalam politik Malaysia. Sikap keras yang ditampilkan DAP terlihat dalam sikap resmi partai yang menolak pembagian masyarakat ke dalam dua golongan, '*Bumiputera*' dan '*Bukan-bumiputera*' dan menuntut agar bahasa Cina dan Tamil disejajarkan dengan bahasa Melayu. Pada saat yang sama, pendirian sekolah-sekolah serta universitas untuk etnis Cina juga gencar dilakukan. Tercatat dua sekolah etnis Cina berdiri, yakni *United Chinese School Committees' Association of Malaysia* (UCSCAM) dan *United Chinese School Teachers' Association of Malaysia* (UCSTAM) pada tahun 1967 meminta agar didirikan sebuah universitas untuk etnis Cina. Universitas yang dinamakan *Universitas Merdeka* tersebut diharapkan menjadi sebuah universitas yang menggunakan bahasa mandarin sebagai bahasa pengantarnya.⁴⁹

Sementara itu, dalam Pemilu 1969, Aliansi mengalami penurunan suara yang cukup besar. Meski masih memenangkan Pemilu 1969 dengan suara terbanyak, namun Aliansi gagal untuk mendapatkan 2/3 suara mayoritas di parlemen. Dalam pemilu Negara bagian, Aliansi hampir kehilangan kekuasaan di Trengganu, kehilangan Penang yang direbut *Parti Gerakan Rakyat Malaysia* (Gerakan), tidak menjadi suara mayoritas di Perak dan Selangor, dan gagal mengambil alih kekuasaan di Kelantan. Secara total, Aliansi hanya mendapatkan 162 kursi Negara bagian dari total 282 yang diperebutkan. Sementara itu, hasil pemilu parlemen juga memperlihatkan hal yang sama. Aliansi hanya meraih 66 kursi dari 104 kursi dengan pembagian UMNO meraih 51 kursi, MCA 13, dan

⁴⁸ ibid, hal 614

⁴⁹ Abdul Rahman Haji Ismail, Malaysia; Sejarah Kenegaraan dan Politik, hal 346

MIC 2. DAP meraih 13 kursi, PAS 12 kursi, Gerakan delapan kursi, dan PPP empat kursi.

Keberhasilan partai oposisi non-Melayu seperti DAP yang merebut kekuasaan di Negara bagian Penang dan Partai Gerakan dalam Pemilu disambut meriah oleh etnis Cina dengan melakukan pawai di Kuala Lumpur. Aksi pawai yang dilakukan etnis Cina menyulut kemarahan etnis Melayu. Kemarahan etnis Melayu terhadap pawai yang dilakukan etnis Cina merupakan kumpulan dari berbagai permasalahan yang dialami etnis Melayu sebelum Pemilu 1969. Pada tahun 1968, tercatat sebanyak 50.000 jiwa etnis Melayu menganggur di saat sebagian besar lapangan kerja dikuasai oleh etnis Cina serta etnis Melayu hanya mendapatkan 1 % kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan Malaysia, sedangkan etnis Cina mendapatkan 22 % kesempatan kerja.⁵⁰ Selain itu, muncul pula kekhawatiran di kelompok etnis Melayu tentang menguatnya pengaruh Cina di dalam kehidupan politik Malaysia. Kemunculan DAP dan lemahnya kerajaan dalam menghadapi tuntutan dari etnis non-Melayu menjadi persoalan serius di kalangan etnis Melayu. Karena itu, muncul banyak kekecewaan etnis Melayu terhadap kerajaan. Hal ini terlihat di dalam kasus *Kebijakan Akta Kebangsaan Melayu* yang meski secara resmi mengakui bahasa Melayu sebagai bahasa Negara, namun masih tetap memperbolehkan penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan-kegiatan resmi. Permasalahan ini berujung pada keluarnya guru-guru Melayu dari UMNO.

Pawai yang dilakukan etnis Cina ini menjadi puncak dari permasalahan etnis di Malaysia sehingga menyulut terjadinya kerusuhan etnis pada tanggal 13 Mei 1969. Kerusuhan pecah setelah terjadi saling hina diantara etnis Melayu dengan etnis Cina di Kuala Lumpur. Kerusuhan ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Tercatat sekitar 600 orang meninggal serta ratusan rumah dibakar.⁵¹ Dengan cepat kerusuhan menyebar ke daerah lain sehingga memaksa pemerintah Malaysia menerapkan keadaan darurat pada 16 Mei dan tentara Malaysia diturunkan untuk mengambil alih keamanan di Malaysia.

⁵⁰ Warjio, PAS dan Kerusuhan Etnis di Malaysia, hal 8

⁵¹ Ibid, hal 13

Sebagai akibat dari kerusuhan etnis yang terjadi, parlemen hasil Pemilu 1969 ditangguhkan dan pemerintahan Malaysia diserahkan kepada *National Operations Council* (NOC) di bawah pimpinan Tun Abdul Razak. NOC kemudian beberapa kebijakan penting yang mengangkat etnis Melayu dalam kehidupan di Malaysia, diantaranya peningkatan peran serta masyarakat Melayu dalam kehidupan ekonomi.

Kerusuhan etnis yang terjadi kemudian membuat sebagian partai politik Malaysia memutuskan untuk bergabung membentuk sebuah koalisi demi menghindari terulangnya peristiwa kerusuhan etnis. Gerakan dan PPP bergabung dengan Aliansi pada 1972, disusul kemudian oleh PAS yang bergabung pada Januari 1973. Dengan bergabungnya beberapa partai politik tersebut, maka dibentuklah Barisan Nasional (BN) pada 1 Juni 1974. Presiden PAS yang diangkat pada 1969 menggantikan Burhanuddin al-Helmy, Datuk Mohammad Asri bin Haji Muda mengatakan bahwa koalisi antara PAS dengan UMNO di dalam Barisan Nasional sesuai dengan prinsip perjuangan Islam yang diyakini PAS.⁵² PAS berupaya untuk memperkuat posisi etnis Melayu dan menghendaki agar suara etnis Melayu tidak terpecah di dalam Pemilu. Alasan inilah yang mendasari keputusan PAS untuk bergabung ke dalam Barisan Nasional.

Koalisi antara PAS dengan UMNO berhasil memenangkan suara mayoritas etnis Melayu pada pemilu 1974. UMNO dan PAS memenangkan semua kursi etnis Melayu sebanyak 75 kursi dengan pembagian UMNO 61 kursi dan PAS 14 kursi. Secara keseluruhan, Barisan Nasional berhasil memenangkan 135 kursi dari 154 kursi parlemen. Sedangkan partai oposisi hanya mendapatkan 19 kursi dengan pembagian DAP Sembilan kursi, Pekemas satu kursi, dan *Sarawak National People's Party* (SNAP) Sembilan kursi.

III. 4. Krisis Kelantan dan kekalahan PAS pada Pemilu 1978

Keputusan PAS untuk bergabung ke dalam koalisi Barisan Nasional bukan tanpa tentangan.⁵³ Kalangan bawah partai menentang koalisi tersebut. Di Kedah

⁵² Ahmad Ibrahim, dkk, *Islam di Asia Tenggara*, hal 100

⁵³ *Ibid*, hal 101

dan Trengganu, anggota PAS meyakini bahwa PAS dapat memenangkan banyak kursi dan membentuk pemerintahan Negara bagian jika tidak bergabung ke dalam Barisan Nasional.⁵⁴ Akan tetapi, Datuk Mohammad Asri bin Haji Muda menegaskan bahwa koalisi yang dibangun sudah sesuai dengan cita-cita PAS dalam menegakkan sebuah Negara berdasarkan Islam.

Pertentangan di dalam tubuh PAS semakin membesar pada tahun 1977. Terjadi krisis kepemimpinan dengan tuntutan mundur terhadap Datuk Haji Mohammed Nasir yang juga pimpinan PAS sebagai Menteri Besar Kelantan. PAS menegaskan jika Mohammed Nasir tidak mundur, maka PAS akan mengajukan sikap mosi tidak percaya di Parlemen Negara Bagian. Tuntutan mundur ini ditolak oleh Mohammed Nasir dan mengatakan bahwa tuntutan mundur ini dikeluarkan PAS karena penangguhan pemberian konsesi kepada Perusahaan Timbermine berupa lahan seluas 160.000 ha serta pembekuan area tanah seluas 110.000 ha di perbatasan Kelantan-Perak yang diyakini mengandung bijih besi dan timah.⁵⁵

Pada bulan September 1977, Komite Eksekutif Pusat PAS mengeluarkan kebijakan pemecatan Mohammed Nasir dari keanggotaan PAS. Pada 15 Oktober 1977, parlemen Negara bagian Kelantan mengadakan pemungutan suara untuk pengambilan sikap mosi tidak percaya kepada Mohammed Nasir. Sebanyak 20 suara mendukung keputusan mosi tidak percaya. Sementara itu, Mohammed Nasir, 13 suara UMNO dan satu suara MCA memutuskan untuk *walk-out*.⁵⁶

Berbeda dengan keputusan PAS yang mengeluarkan Mohammed Nasir dari keanggotaan PAS, dukungan terhadap Mohammed Nasir menguat. UMNO mendukung Mohammed Nasir untuk tetap menjabat sebagai Menteri Besar. Dukungan juga diberikan oleh masyarakat Kelantan yang tetap menginginkan Mohammed Nasir berkuasa. Pada 22 September 1977, tercatat lebih dari 100.000 demonstran menyatakan dukungannya terhadap Mohammed Nasir. Disusul kemudian demonstrasi pada 24 September yang diikuti oleh 60.000 massa di daerah Merdeka Padang. Aksi demonstrasi ini membuat pemerintah Negara

⁵⁴ Ismail Kassim, *The Politics of accommodation, an Analysis of the 1978 Malaysia General Election*, hal 20

⁵⁵ Lim Kit Siang, *Time Bombs in Malaysia*, hal 248

⁵⁶ *Ibid*

bagian Kelantan mengeluarkan jam malam pada 19 Oktober di Kota Bahru dan juga di Kubang Krian.

Menyikapi krisis yang terjadi di Kelantan, Mahathir Mohammad memberikan sebuah usulan tentang pembentukan *National Operations Council* (NOC) di Kelantan untuk mengatasi krisis. Usulan ini dilandasi pada artikel ke 150 di dalam Konstitusi Federal yang memberikan kewenangan kepada *Yang Dipertuan Agung* untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam berbagai masalah yang dianggap dapat mengganggu kestabilan Malaysia serta memberikan legitimasi kepada Parlemen Federal untuk menerapkan hukum darurat, membekukan konstitusi Negara bagian, dan membentuk NOC di Negara bagian. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Hussein Onn merespon usulan pembentukan NOC dengan memanggil petinggi PAS pada bulan November dan memberikan waktu untuk membalas usulan dari Mahathir. PAS menolak usulan tersebut. Penolakan PAS mendapatkan kecaman dari anggota Barisan Nasional. Atas usulan dari UMNO, Barisan Nasional menuntut agar PAS melakukan pergantian pimpinan. PAS tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut. Penolakan ini berujung pada dikeluarkannya PAS dari keanggotaan Barisan Nasional.⁵⁷ Sementara itu, para pendukung Mohammed Nasir memutuskan untuk keluar dari PAS dan membentuk *Barisan Jemaah Islamiyah Malaysia* (Berjasa) pada awal tahun 1978.

Kerjasama antara PAS dengan DAP yang merupakan partai etnis Cina diserang oleh UMNO dengan mengatakan bahwa kerjasama tersebut 'tidak suci'.⁵⁸ Di sisi lain, sejak dikeluarkan dari Barisan Nasional dan mengalami kekalahan pada pemilu Negara bagian Kelantan, PAS memiliki hubungan yang erat dengan *Angkatan Belia Islam Malaysia* (ABIM). Kedekatan ini dimungkinkan karena adanya permintaan dari Muhammad Natsir kepada Presiden ABIM, Anwar Ibrahim untuk membantu perjuangan PAS, sehingga ABIM mengambil keputusan untuk mengirim tokoh-tokoh ABIM ke dalam PAS.⁵⁹ Tercatat tiga anggota ABIM maju sebagai kandidat PAS dalam pemilihan di Kedah.

⁵⁷ Opcit, hal 21

⁵⁸ Sankaran Ramanathan, loc. cit, hal 16

⁵⁹ Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia*, hal 273

Dalam kampanyenya, PAS menyerang UMNO dengan mengatakan perjuangan UMNO 'tidak memperhatikan Islam'.⁶⁰ PAS menegaskan posisinya sebagai penantang partai yang tidak berideologi Islam atau hanya menjadikan Islam sebagai bahan kampanye. Di Negara bagian Kedah, PAS secara personal menyerang Mahathir Mohammad dan menuduh Mahathir sebagai 'anti-Islam'.⁶¹ Akan tetapi, PAS gagal merebut simpati etnis Melayu dan mengalami penurunan suara yang drastis dibanding Pemilu 1974. Munculnya Berjasa yang berkoalisi dengan Barisan Nasional memberikan tekanan yang kuat kepada PAS pada pemilu 1978. Pada pemilu Negara Bagian Kelantan yang diselenggarakan pada Maret 1978, PAS menempatkan 36 calon anggota parlemen Negara Bagian, sedangkan UMNO menempatkan 24 calon dan Berjasa 25 calon. Koalisi Berjasa-UMNO berhasil mengalahkan PAS dengan meraih 34 kursi (UMNO 22 kursi, MCA satu kursi, dan Berjasa 11 kursi). Sedangkan PAS hanya mendapatkan dua kursi. Keberhasilan BN-Berjasa memenangkan pemilihan Negara bagian membuat PAS kehilangan kekuasaan di Kelantan yang telah dipegang sejak 1959. Secara keseluruhan, PAS hanya meraih sembilan suara pada pemilu Negara bagian dari total 275 kursi. Sedangkan di pemilihan parlemen, PAS hanya meraih lima kursi dari 154 kursi. Sementara itu, BN berhasil meraih 131 kursi pada pemilihan parlemen dan mendapatkan 239 kursi Negara bagian.

Kekalahan PAS di dalam Pemilu 1978 yang berujung pada jatuhnya kekuasaan PAS di Kelantan disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah perpecahan yang terjadi di dalam tubuh PAS. Upaya PAS untuk mengganti Mohammad Nasir sebagai Menteri Besar Kelantan membuat perolehan suara PAS menurun drastis karena masyarakat Kelantan menolak keputusan penggantian Mohammad Nasir. Penolakan ini berujung pada pembentukan partai politik *Barisan Jamaah Islamiyah Malaysia* (BERJASA), yang bersama dengan BN berhasil memenangkan pemilihan di Kelantan. Faktor kedua adalah keluarnya beberapa petinggi PAS yang tidak setuju dengan keputusan PAS untuk bergabung

⁶⁰ Ismail Kassim, op.cit, hal 49

⁶¹ Ibid, hal 50

dengan Barisan Nasional. Mereka kemudian mengikuti Pemilu melalui jalur independen.

Tabel III.4
perolehan kursi partai politik pada Pemilu Parlemen di Semenanjung Malaysia
1978

Negara Bagian	Perolehan kursi parlemen			total
	BN	DAP	PAS	
Kedah	11	-	2	13
Perlis	2	-	-	2
Penang	4	4	1	9
Perak	17	4	-	21
Selangor	10	1	-	11
Malaka	3	1	-	4
Negeri sembilan	5	1	-	6
Johor	15	1	-	16
Trengganu	7	-	-	7
Kelantan	10	-	2	12
Pahang	8	-	-	8
Teritori Federal	2	3	-	5
Total	94	15	5	114

Sumber : Ismail Kassim, *The Politics of accommodation, an Analysis of the 1978 Malaysia General Election*, hal 66

Tabel III.5

Perolehan kursi partai politik pada pemilihan Negara bagian 1978 di Semenanjung Malaysia (tidak termasuk pemilihan Negara bagian Kelantan)

Negara Bagian	Perolehan kursi parlemen				total
	Barisan Nasional	DAP	PAS	independen	
Kedah	19	-	7	-	26
Perlis	12	-	-	-	12
Penang	20	5	1	1	27
Perak	32	9	1	-	42
Selangor	28	3	-	1	32
Malaka	16	4	-	-	20
Negeri sembilan	21	3	-	-	24
Johor	31	1	-	-	32
Trengganu	28	-	-	-	28
Pahang	32	-	-	-	32
Total	239	25	9	2	275

Sumber : Ismail Kassim, The Politics of accommodation, an Analysis of the 1978 Malaysia General Election, hal 66

BAB IV

PERJUANGAN PAS DALAM PENEGAKAN NEGARA ISLAM

IV.1. Radikalisme Kepemimpinan PAS Pasca Pemilu 1978

Setelah kekalahan pada Pemilu 1978, PAS mendapatkan simpati besar dari tokoh-tokoh muda gerakan Islam di Malaysia. *Angkatan Belia Islam Malaysia* (ABIM) adalah salah satunya. Hal ini terlihat dari bergabungnya sejumlah tokoh ABIM seperti Fadzil Mohammad Noor yang kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden PAS di tahun 1982 serta Nakhaie Haji Ahmad, seorang mantan anggota komite eksekutif ABIM. Selain bergabungnya anggota ABIM ke dalam PAS, timbul keinginan untuk melakukan pergantian kepemimpinan PAS. Keinginan ini didasari kekecewaan anggota PAS terhadap kepemimpinan dari Mohammad Asri bin Haji Muda, yang dianggap berperan besar atas kekalahan PAS di tahun 1978, sehingga pada tahun 1982 Mohammad Asri digantikan oleh Yusof Rawa, mantan Duta Besar Malaysia untuk Iran. Pergantian kepemimpinan ini menandai perubahan arah kepemimpinan politik PAS dari nasionalisme kanan menuju kepemimpinan ulama.⁶² Dalam kepemimpinan baru tersebut, dibentuk *Majelis Syura al-Ulama*, yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut *Mursyid 'Am*.⁶³

Perubahan kepemimpinan di dalam PAS menyebabkan PAS bergerak ke arah yang lebih radikal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kuatnya pengaruh gerakan Islam Internasional seperti *Ikhwanul Muslimin* dan *Jamiat Islami* di dalam PAS. Bangkitnya gerakan revivalisme Islam di dunia juga berimbas terhadap Islam di Malaysia, termasuk PAS. Tokoh-tokoh PAS seperti Abdul Hadi Awang, Nik Aziz Nik Mat, Fadzil Noor, dan Nakhaie Ahmad merupakan tokoh-tokoh yang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir.⁶⁴ Hal ini menyebabkan tokoh-tokoh PAS bersentuhan dengan pemikiran dari gerakan revivalisme Islam yang berkembang di Timur Tengah. Pengaruh gerakan Islam Internasional tersebut dapat dilihat dari buku karya Wakil Presiden PAS, Abdul Hadi Awang, *Muqaddimah Aqidah Muslimin* yang berisi

⁶² Jabatan Arkib PAS Pusat, Sejarah PAS, hal 3

⁶³ Ahmad Fauzi Abdul Hamid, Transnasional Islam in Malaysia, hal 151

⁶⁴ Hussin Muthalib, Islam in Malaysia, hal 37

tentang hakikat kekafiran di dalam Islam. Buku ini merujuk kepada buku *Al-Islam* karya seorang tokoh *Ikhwanul Muslimin*, Said Hawwa dan *Risalah Kepada Jamaah Haji* karya Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, seorang mufti dari Kerajaan Arab Saudi.⁶⁵

Faktor kedua adalah pengaruh dari revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979 memberikan inspirasi kepada pemimpin PAS untuk melakukan hal yang sama di Malaysia, terlebih dengan pengangkatan Yusof Rawa, mantan duta besar Malaysia di Iran yang melihat langsung peristiwa revolusi Iran tersebut. Dalam pidato yang dibacakan pada pertemuan tahunan PAS ke-29, Yusof Rawa menyinggung revolusi Iran dengan mengatakan bahwa revolusi Iran berhasil karena memperjuangkan Islam sehingga Allah memberikan bantuan-Nya. Oleh karena itu, PAS wajib mencontoh apa yang telah dilakukan oleh ulama Iran.⁶⁶

Beralihnya PAS ke dalam pandangan yang lebih radikal menimbulkan berbagai kontroversi yang kemudian menjadi isu nasional. Di dalam masalah sholat, anggota PAS tidak mau melaksanakan sholat yang diimami oleh anggota UMNO karena menganggap anggota UMNO adalah kafir. Terdapat tujuh alasan pengkafiran yang dilakukan oleh PAS terhadap UMNO.⁶⁷ Alasan pertama adalah tidak diterapkannya hukum-hukum Islam oleh UMNO, bahkan UMNO menolak penerapan hukum Islam secara menyeluruh. Alasan kedua adalah diterapkannya peraturan-peraturan yang berasal dari Inggris, sementara menurut PAS, Inggris adalah kafir. Alasan ketiga adalah UMNO memperjuangkan nasionalisme Melayu, sehingga timbul kesan *ashabiyyah* (fanatisme golongan), sedangkan Islam menolak *ashabiyyah*. Alasan keempat adalah UMNO menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Alasan kelima adalah UMNO memperjuangkan sekularisme. Alasan keenam adalah UMNO dipimpin oleh orang-orang yang bodoh dalam beragama. Alasan ketujuh adalah UMNO memperolok hukum-hukum Islam dengan bekerja sama dengan kelompok non-muslim seperti MCA dan MIC. Anggapan bahwa anggota UMNO adalah kafir membuat anggota PAS menolak membayarkan zakat kepada petugas pemerintah

⁶⁵ Abdul Rahman bin Haji Abdullah, op.cit, hal 277

⁶⁶ Ibrahim Abu Bakar, PAS and Its Islamist Fundamentalism in Malaysia, hal 15

⁶⁷ Effendi Choirie, Islam-Nasionalisme UMNO-PKB, hal 100

dan mendorong anggotanya untuk melakukan perceraian jika salah satu pasangannya adalah anggota UMNO.⁶⁸

Pemerintah mengecam tindakan yang dilakukan PAS dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PAS merupakan suatu tindakan yang dapat mengancam persatuan umat Islam dan keselamatan negara. Presiden UMNO, Mahathir Mohammad mengajukan tantangan berdebat dengan PAS mengenai isu-isu keislaman, meski kemudian debat UMNO-PAS tidak dilaksanakan karena dibatalkan oleh *Yang Dipertuan Agung* Malaysia. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah mengeluarkan Kertas Putih tentang 'Ancaman kepada Perpaduan Umat Islam dan Keselamatan Negara'. PAS membalas Kertas Putih tersebut dan menerbitkan risalah baru untuk mempertahankan konsep kekufuran menurut PAS serta penjelasan tentang masalah yang terjadi seperti sholat dua imam.

Puncak masalah pengkafiran yang dilakukan oleh PAS terjadi ketika seorang anggota PAS bernama Osman bin Talib tewas dibunuh oleh anggota UMNO saat kampanye PAS di daerah FELDA Lubok Merbau pada Maret 1985. Kematian Osman bin Talib dianggap oleh PAS sebagai mati syahid. Tetapi kematiannya oleh Majelis Fatwa Negeri Kedah bukanlah mati syahid karena mati syahid adalah mati dalam peperangan melawan orang-orang kafir.⁶⁹ Selain kematian Osman bin Talib, kematian Ibrahim Libya yang tewas akibat serangan angkatan bersenjata Malaysia karena didakwa sebagai penjahat yang dapat mengancam keamanan Negara oleh pemerintah juga menimbulkan pertentangan. Komisi Fatwa Majelis Agama Islam Negeri Kedah menganggap bahwa Malaysia adalah Negara Islam sehingga kematian Ibrahim Libya bukanlah mati syahid, melainkan mati dalam keadaan sebagai pemberontak.⁷⁰ PAS menolak fatwa tersebut dan mengatakan bahwa Ibrahim Libya mati syahid dan bukan pemberontak karena Malaysia bukanlah Negara Islam sebagaimana fatwa dari Majelis Fatwa Kedah.

Konsep mati syahid menurut PAS dapat dilihat dari perkataan Ibrahim Libya. Ibrahim Libya mengatakan :

⁶⁸ Abdul Rahman bin Haji Abdullah, op.cit, hal 274

⁶⁹ Ibid, hal 278

⁷⁰ Ibid, hal 279

“yang wajib kita perjuangkan ialah Islam, bukan bangsa. Perjuangan bangsa ialah perjuangan thagut yang pelakunya tidak diakui Nabi sebagai umatnya. Apalagi kerajaan yang zalim yang tidak menghukum dengan hukum Allah, memakai undang-undang otak manusia. Sebab itu, jika mereka mati dalam perjuangan bangsa, nabi tidak mengakuinya sebagai umatnya. Tetapi, kalau kita berperang, jika mati, namanya mati syahid.”⁷¹

Ibrahim Libya juga mengatakan :

“kamu adalah orang Islam, dan jangan ketika kamu telah menjadi orang Islam, tiba-tiba kamu hendak menyekat perjuangan kami. Kami berjuang dalam harakah PAS untuk menegakkan Kalimatullah. Kamu jangan coba sekat kami, kalau kamu sekat, kami tentang kamu. Kalau kami mati, kami mati syahid. Kalau kamu mati, mati katak.”⁷²

IV.2. Tantangan Kebijakan Islamisasi Mahathir Mohammad terhadap PAS

Perubahan di dalam tubuh PAS mengubah pandangan PAS dalam memandang masalah nasionalisme. Pengaruh gerakan islam internasional seperti *Ikhwanul Muslimin* dan *Jamiat Islami* membuat PAS menolak nasionalisme Melayu dan menginginkan universalisme Islam. PAS beranggapan, nasionalisme Melayu merupakan pandangan sempit yang menonjolkan fanatisme golongan, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menurut Siddiq Fadhil, penolakan PAS terhadap nasionalisme bukan hanya karena nasionalisme dilahirkan di Eropa dalam kondisi sekular, melainkan juga nasionalisme Melayu dianggap mencoba untuk menghidupkan kembali tradisi budaya pra-Islam yang bertentangan dengan agama.⁷³ Pandangan PAS mendapatkan dukungan dari gerakan Islam reformis di Malaysia, seperti ABIM, Suara Al-Islam, dan *Islamic Representative Council* (IRC) yang juga dipengaruhi oleh pemikiran *Ikhwanul Muslimin* dan *Jamiat Islami*. ABIM mengatakan bahwa modernisasi dan sekularisme yang terjadi di Malaysia adalah *thagut*⁷⁴ dan *jahiliyah*⁷⁵. Menurut Anwar Ibrahim, Undang-

⁷¹ Effendi Choirie, op.cit, hal 104

⁷² Ibid,

⁷³ Ibid,

⁷⁴ Thagut adalah sebutan bagi sesembahan selain Allah atau kerelaan seseorang kepada sesuatu yang melanggar perintah Allah. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, Thagut juga dapat diartikan sebagai keridhoan seseorang terhadap pemimpin yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah. Pengertian ini dapat dilihat pada Al-Qur'an Surat Asy-Syuuraa ayat 21 yang berbunyi :” Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahhan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?

⁷⁵ Menurut Sayyid Quthb, Jahiliyah berarti ‘kondisi ketidaktahuan seseorang terhadap ketentuan-ketentuan Allah’. Di dalam Al-Qur'an, surat Al Maidah ayat 50, istilah jahiliyah dialamatkan kepada orang-orang yang menolak hukum Allah. “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka

Undang pemerintah Malaysia yang merintangi kebangkitan Islam tidak dapat menghalangi golongan *mustadh'afin*⁷⁶ dari menentang kedzoliman.⁷⁷

UMNO menolak pandangan PAS karena menganggap nasionalisme Melayu tidak bertentangan dengan Islam. Nasionalisme Melayu menurut UMNO adalah bentuk kecintaan terhadap tanah air, sedangkan cinta tanah air adalah bagian dari Islam.

Sementara itu, setelah Pemilu 1978, pemerintah mulai menggunakan Islam sebagai upaya mengurangi dukungan warga Melayu kepada PAS. Hussein Onn, Perdana Menteri Malaysia menegaskan hal ini dengan mengatakan :

*“ Anda mungkin bertanya-tanya mengapa kami begitu banyak mengeluarkan uang untuk Islam. Karena jika tidak, PAS akan mendapatkan kami. Partai itu akan menuduh kami tidak agamis dan akibatnya rakyat akan kehilangan kepercayaan.”*⁷⁸

Pada tahun 1981 Mahathir Mohammad diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia menggantikan Dato' Hussein Onn yang menderita sakit. Pengangkatan Mahathir Mohammad semakin menegaskan kebijakan Islamisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tercatat beberapa kali pemerintahan Mahathir melaksanakan konferensi Islam internasional, diantaranya konferensi Manajemen Islam Kawasan Asia-Fasifik yang diselenggarakan pada 1987 serta Konferensi Ekonomi Islam di tahun yang sama. Di bidang pendidikan, Mahathir menyetujui pembangunan Universitas Islam Antar-Bangsa pada 1982. Di bidang ekonomi, Mahathir berhasil mendirikan Bank Islam yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tidak menggunakan bunga bank dalam setiap transaksi keuangan.

Kekalahan PAS pada Pemilu terulang pada tahun 1982. Meski menyuarakan amandemen konstitusi berdasarkan Islam dan penerapan hukum Islam secara menyeluruh di Malaysia, namun hal tersebut gagal meyakinkan pemilih Melayu

kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Al-Maidah : 50)

⁷⁶ Dalam pengertian umum, *mustadh'afin* merujuk kepada orang-orang yang lemah. Menurut Ayatullah Khomeini, *mustadh'afin* berarti 'orang-orang kecil yang tertindas'.

⁷⁷ Abdul Rahman Haji Abdullah, op.cit, hal 271

⁷⁸ Ibid, hal 161

untuk memilih PAS. Bergabungnya mantan Presiden ABIM, Anwar Ibrahim ke dalam UMNO menjelang Pemilu 1982 memberikan pukulan telak kepada PAS. Anwar Ibrahim yang pernah menjadi juru kampanye PAS pada Pemilu 1978 memutuskan bergabung dengan UMNO karena menganggap tujuan-tujuan Islam yang diusung olehnya akan berjalan dengan baik jika bergabung dengan partai pemerintah.⁷⁹ Selain itu, kebijakan Islamisasi Mahathir lebih menarik perhatian masyarakat Melayu daripada slogan PAS yang menyuarakan universalisme Islam.

Dalam Pemilu 1982, PAS hanya mampu meraih 18 kursi pemilu Negara bagian dengan rincian 10 kursi di Kelantan, dua kursi di Kedah, satu kursi di Perlis, dan lima kursi di Trengganu. Sementara pada Pemilu Parlemen, PAS hanya meraih lima kursi dengan rincian empat kursi di Kelantan dan satu kursi di Kedah. Sementara UMNO berhasil mendapatkan 195 kursi Negara bagian dan 70 kursi parlemen.

Meski gagal untuk mendapatkan suara mayoritas etnis Melayu pada pemilu 1982, namun PAS tidak mengubah pandangannya terhadap masalah nasionalisme Melayu yang diusung oleh UMNO. Dalam pertemuan tahunan ke-30 PAS yang diselenggarakan pada tahun 1984, Yusof Rawa kembali menyinggung masalah fanatisme golongan selain masalah-masalah lain seperti kebijakan Islamisasi pemerintah, kebijakan *New Economic Policy* (NEP), serta pendidikan Malaysia. Yusof Rawa mengatakan bahwa orang-orang Malaysia mewarisi nasionalisme dan fanatisme dari pemerintahan kolonial yang memusuhi Islam, sehingga nasionalisme dan fanatisme orang-orang Melayu harus ditinggalkan. Yusof Rawa juga mengatakan bahwa kebijakan Islamisasi yang dilakukan oleh UMNO tidak akan berhasil karena anggota serta pemimpin UMNO adalah sekuler dan nasionalis.⁸⁰

Untuk memenangi Pemilu 1986, PAS berusaha untuk mendapatkan suara dari kelompok non-Melayu. Di akhir 1985, meski bertentangan dengan kampanye PAS yang menyerang koalisi antara UMNO dengan partai non-muslim seperti MCA dan MIC, PAS membentuk *Chinese Consultative Committee* (CCC), sebuah

⁷⁹ Diane K. Mauzy, *Tradition, Modernity, and Islam*, hal 51

⁸⁰ Ibrahim Abu Bakar, *op.cit*, hal 16

lembaga yang akan menjembatani PAS dengan komunitas Cina. Abdul Hadi Awang dalam upayanya mendapatkan simpati etnis non-Melayu juga menegaskan, jika PAS berkuasa di Malaysia, PAS akan menghapuskan hak istimewa Melayu dan Bumiputera yang ada di perlembagaan, menghapuskan tanah simpanan Melayu, mencabut NEP, dan dasar-dasar lain yang mengistimewakan etnis Melayu.⁸¹ PAS dengan giat melakukan kampanye menyerang kebijakan UMNO dan berharap mendapatkan setidaknya Sembilan kursi parlemen dan 20 kursi Negara bagian di Kelantan. Kampanye yang dilakukan oleh PAS mendapatkan kecaman dari Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim menuduh PAS sebagai partai yang tidak dapat dipercaya karena mengkhianati warga Melayu dengan keinginan membuang hak-hak istimewa warga Melayu.⁸²

Hasil Pemilu 1986 berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh PAS. Dalam pemilu tersebut, PAS kembali gagal memenangkan suara mayoritas. Bahkan sebaliknya, perolehan suara PAS menurun drastis. Pada Pemilu 1986, PAS hanya mendapatkan satu kursi parlemen dari 99 kandidat yang dimajukan dan 15 kursi Negara bagian, masing-masing 10 kursi di Kelantan, tiga kursi di Kedah, dan dua kursi di Trengganu. Secara total, PAS hanya memenangkan 5,66 % suara pemilih.⁸³

Kekalahan telak yang diderita PAS pada Pemilu 1986 disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama kekalahan PAS adalah kekecewaan etnis Melayu terhadap kebijakan yang diambil PAS terhadap etnis non-Melayu. PAS menjanjikan kepada etnis non-Melayu untuk mencabut hak istimewa warga Melayu sehingga warga etnis non-Melayu akan memiliki hak yang sama dengan warga Melayu. Selain itu, Pembentukan CCC dianggap mengkhianati slogan PAS yang menampilkan dirinya sebagai partai Islam dan sering mengkritik kerja sama UMNO dengan partai non-Melayu, sehingga oleh pendukungnya, PAS dianggap sama dengan UMNO. Faktor kedua adalah kampanye PAS yang ingin menghapuskan hak-hak istimewa warga Melayu. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Abdul Hadi Awang tersebut mendapatkan respon negatif dari warga Melayu.

⁸¹ Choirie, op.cit, hal 98

⁸² Ibid, hal 179

⁸³ Sankaran Ramanathan dan Moh. Hamdan Adnan, Malaysia's 1986 General election, hal 60

Selain itu, kampanye PAS yang mengeluarkan slogan 'PAS: Parti Allah' menjadikan PAS tampak sebagai partai yang tidak toleran, tidak hanya oleh warga non-Muslim, melainkan juga warga muslim sendiri.⁸⁴ Dualisme yang diperlihatkan PAS dengan membuat kerja sama dengan etnis Cina dan mengeluarkan slogan sebagai partai Allah mengakibatkan PAS hanya mendapatkan satu kursi parlemen.

VI. 3. Kemenangan Pemilu 1990 : Keberhasilan Menguasai Kembali Kelantan

Menyusul kekalahan telak yang dialami pada Pemilu 1986, PAS kemudian berubah menjadi lebih moderat. PAS tidak lagi menjadikan pandangan dari tokoh kebangkitan Islam seperti Abul A'la al-Maududi dan Sayyid Quthb sebagai rujukan utama. Sebaliknya, PAS mulai bersikap kritis terhadap pandangan tokoh *Ikhwanul Muslimin* dan *Jamiat Islami* tersebut. Abdul Hadi Awang mengatakan bahwa pandangan Sayyid Quthb dalam melihat Negara memiliki kelemahan. Dalam bukunya, *Ma'alim fi at-Thariq*, Sayyid Quthb membagi Negara hanya menjadi dua, *Darul Harb* (Negara Kafir) dan *Darul Islam* (Negara Islam). Menurut Abdul Hadi Awang, seharusnya terdapat satu bentuk Negara lain, yakni *Darul Ahd* (Negara yang memiliki perjanjian dengan Negara Islam).⁸⁵ Meski demikian, PAS tetap berusaha untuk mewujudkan Negara yang berlandaskan pada hukum-hukum Islam.

Di sisi lain, terjadi perpecahan di dalam tubuh UMNO. Dalam pemilihan pimpinan di tahun 1987, UMNO terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Mahathir Mohammad dan kubu Tengku Razaleigh Hamzah. Kubu Razaleigh Hamzah yang didukung oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, Abdullah Ahmad Badawi serta mantan Deputy Perdana Menteri, Musa Hitam menuduh kubu Mahathir Mohammad melakukan korupsi. Tuduhan ini berdasarkan dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Pulau Pinang, Proton Saga, Daya Bumi, dan Lebuhraya

⁸⁴ Joseph Chin Yong Liow, *Exigency or Expediency? Contextualising Political Islam and the PAS challenge in Malaysian Politic*, hal 367

⁸⁵ Abdullah, *op.cit*, hal 282

Utara-Selatan akibat mekanisme tender yang tidak jelas.⁸⁶ Perpecahan ini berujung pada pembubaran UMNO oleh Mahkamah Tinggi Malaysia pada 5 Februari 1988. Pembubaran UMNO ini membuat Mahathir Mohammad membentuk UMNO Baru delapan hari setelah keputusan pembubaran UMNO dikeluarkan. Sementara itu, Tengku Razaleigh membentuk Semangat 46.⁸⁷

Perpecahan di dalam UMNO dimanfaatkan PAS dengan menjalin kerja sama dengan Semangat 46. Pemimpin PAS merasa perolehan suara PAS akan meningkat secara signifikan jika bekerja sama dengan Semangat 46.⁸⁸ Kerja sama dengan Semangat 46 juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesan PAS sebagai partai ekstrimis dan fundamentalis.⁸⁹ PAS menyadari, kekalahan telak yang diderita pada Pemilu 1986 disebabkan pandangan pemilih yang melihat PAS sebagai partai yang radikal. Sebaliknya, Semangat 46 memandang kerja sama dengan PAS dibutuhkan untuk memperbesar kesempatan memimpin di level nasional. Untuk memperbesar kemungkinan menang, PAS dan Semangat 46 membentuk Angkatan Perpaduan Ummah (APU), yang juga menggabungkan dua partai Melayu lainnya, Hamim dan Berjasa.

Kerja sama antara PAS dengan Semangat 46 bukan tanpa masalah. Permasalahan utama terletak pada perbedaan ideologi antara PAS dengan Semangat 46. Bagaimanapun juga, Semangat 46 adalah warisan dari UMNO dan para pemimpinnya adalah mantan tokoh UMNO yang berseberangan dengan PAS. PAS yang secara konsisten menuntut pendirian Negara Islam harus bersentuhan dengan Semangat 46 yang sekuler. Masalah lainnya adalah jatah pembagian kursi dalam pemilihan umum. Masalah muncul karena baik PAS maupun Semangat 46 adalah partai Melayu. Masalah terakhir adalah kegagalan Semangat 46 untuk meyakinkan *Democratic Ation Party* (DAP) untuk bergabung dalam koalisi PAS-Semangat 46. Hal ini didasari pada penolakan DAP terhadap ide pembentukan Negara Islam yang dikampanyekan PAS. Penolakan DAP membuat Tengku Razaleigh memutuskan untuk membentuk satu koalisi lagi antara Semangat 46

⁸⁶ Choirie, op.cit, hal 181

⁸⁷ Angka 46 menunjukkan tahun pembentukan UMNO

⁸⁸ Hari Singh, *Political Change in Malaysia : the Role of Semangat 46*

⁸⁹ Khong Kim Hoong, *Malaysia's General Election 1990, Continuity, Change, and Ethnic Politics*, hal 9

dengan DAP dan partai lain seperti *Parti Rakyat Malaysia* (PRM), *All Malaysia Indian Progressive Party* (AMIPF), dan *Malaysian Solidarity Party* (MSP).

Dalam menghadapi Pemilu 1990, PAS hanya mencalonkan 30 kandidat untuk kursi parlemen. Jumlah ini jauh di bawah jumlah kandidat pada Pemilu 1986 yang mencalonkan 99 kandidat. Sedangkan untuk pemilihan Negara bagian, PAS mencalonkan 114 kandidat. Hal ini didasari pada kesepakatan yang dibangun antara PAS dengan Semangat 46. Semangat 46 yang juga merupakan partai Melayu diberikan hak mencalonkan kandidat yang lebih banyak di pemilihan parlemen. Sebaliknya, PAS mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk mencalonkan kandidatnya di pemilihan Negara bagian. PAS dan Semangat 46 juga menyepakati pembagian kekuasaan jika berhasil meraih suara mayoritas mengalahkan Barisan Nasional, khususnya UMNO. Jika menang, PAS akan mendapatkan jatah Menteri Besar, sedangkan Semangat 46 akan mendapatkan jatah Perdana Menteri.

Menyadari kesalahan yang dibuat pada Pemilu 1986 yang mencoba untuk mendapatkan suara dari etnis non-Melayu, PAS melakukan perubahan dengan lebih berkonsentrasi untuk mendapatkan kembali kepercayaan pemilih Melayu. Tampilan radikal yang melekat pada PAS berusaha dihilangkan dengan mengganti slogan 'PAS : Parti Allah' menjadi 'Membangun Bersama Islam'. Selain itu, dalam manifesto pemilu 1990, PAS berjanji untuk melindungi hak-hak orang non-muslim dan memberikan kebebasan menjalankan agama, budaya, serta partisipasi dalam bidang politik.⁹⁰

Pemilu 1990 memberikan hasil yang menggembirakan bagi PAS. Jika pada Pemilu 1986 PAS mengalami kekalahan telak dengan hanya mendapatkan satu kursi parlemen dan 15 kursi Negara bagian, maka pada Pemilu 1990 PAS berhasil mendapatkan tujuh kursi parlemen dengan rincian enam kursi dari Kelantan dan satu kursi dari Trengganu. Sementara di pemilihan Negara bagian, PAS berhasil meraih 33 kursi dengan memenangkan kursi mayoritas di Kelantan dengan meraih 24 kursi. Sisa Sembilan kursi didapatkan dari Trengganu sebanyak delapan kursi dan satu kursi di Kedah.

⁹⁰ Hoong, *ibid*, hal 40

Meski gagal meraih suara mayoritas dalam Pemilu 1990, namun koalisi PAS dengan Semangat '46 berhasil meraih semua kursi parlemen dan negara bagian di Kelantan. Dari total 13 kursi parlemen, PAS meraih enam kursi dan Semangat '46 meraih tujuh kursi. Sedangkan dari total 34 kursi Negara bagian, PAS meraih 24 kursi dan Semangat '46 mendapatkan 10 kursi. Untuk pertama kali, UMNO gagal meraih satupun kursi di Kelantan, wilayah yang menjadi basis Melayu di Utara Malaysia.

Kemenangan PAS di Kelantan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kerja sama PAS dengan Semangat 46. Keberhasilan PAS menguasai kembali Kelantan oleh banyak kalangan dinilai berkat andil dari ketokohan Tengku Razaleigh Hamzah. Kelantan merupakan tempat kelahiran Tengku Razaleigh. Hal ini membuat Tengku Razaleigh memiliki banyak pendukung di Kelantan sehingga membuat koalisi antara PAS-Semangat 46 berhasil mengalahkan UMNO. Faktor kedua adalah perubahan PAS menjadi lebih moderat. Slogan 'Membangun Bersama Islam' setidaknya menghilangkan kesan radikal di dalam PAS. Faktor ketiga adalah kampanye PAS yang tetap ingin menerapkan hukum-hukum Islam meski ingin mengubah pandangan radikal yang melekat di masyarakat terhadap PAS. Kampanye ini berhasil menarik kembali pemilih di wilayah utara Malaysia yang secara tradisi merupakan basis Melayu tradisional.

Kemenangan di Kelantan menjadikan PAS berhak kembali memimpin setelah pada tahun 1978 harus kehilangan kekuasaannya. Dengan kemenangan ini, setidaknya upaya PAS untuk mewujudkan Negara yang berlandaskan hukum Islam perlahan tercapai. Sebagai langkah awal, pada tahun 1993, PAS berhasil menerapkan *Hudud* (hukum yang berlandaskan pada syariat Islam) meski mendapat tentangan dari pemerintah Malaysia. Bagaimanapun juga, keberhasilan ini semakin menegaskan posisi PAS sebagai partai oposisi utama di Malaysia menghadapi UMNO, sebagai sesama partai yang berbasiskan warga etnis Melayu.

BAB V

PENUTUP

Malaysia, sebagai Negara yang didominasi oleh tiga etnis besar yaitu etnis Melayu, Cina, dan India memiliki sistem politik yang menarik untuk dikaji. Kultur politik yang dibangun atas dasar persamaan etnis menjadikan partai politik di Malaysia berwujud dalam partai politik etnis. Amat sulit bagi seseorang untuk memasuki partai politik yang bukan representasi etnis dirinya.

Di dalam alam politik Melayu, *United Malay Nation Organization* (UMNO) dan *Parti Al-Islam Se-Malaysia* (PAS) adalah partai yang dianggap sebagai representasi utama warga Melayu. Kedua partai tersebut memiliki perbedaan mendasar meski PAS berasal dari divisi keagamaan UMNO yang keluar pada tahun 1951. PAS yang berideologi Islam dan menghendaki penerapan hukum Islam secara menyeluruh di Malaysia harus berhadapan dengan UMNO yang sekuler.

Perjuangan PAS dalam menegakkan hukum Islam di Malaysia bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Upaya PAS untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya selalu menghadapi tantangan dari UMNO. Dapat dikatakan, UMNO merupakan hambatan utama bagi PAS. Di sini, kita dapat melihat dua hal berbeda dari perjuangan PAS dalam penegakan syariat Islam di Malaysia.

Pertama, penguasaan Kelantan oleh PAS setidaknya memberikan gambaran bahwa bagaimanapun juga, PAS mampu untuk memberikan perlawanan politik terhadap UMNO. PAS berhasil melegitimasi kekuasaannya di Kelantan dalam bentuk penerapan syariat Islam yang dimulai pada tahun 1959 meski bertahap. Sebagai contoh adalah penerapan hukum hudud yang baru berhasil diterapkan pada tahun 1993, tiga tahun setelah pemilu 1990 serta penggunaan mata uang dinar dan dirham yang baru disahkan pada tahun 2009. Dukungan masyarakat Kelantan juga tidak dapat dikesampingkan karena memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan PAS dalam menguasai Kelantan meski sempat kehilangan kekuasaan pada tahun 1978. Pengaruh *Pondok* serta *Tok Guru* menjadi faktor utama kuatnya dukungan masyarakat Kelantan.

Selain itu, tampaknya koalisi PAS-UMNO merupakan suatu hal yang amat sulit untuk diwujudkan. Meski sempat bergabung dalam Barisan Nasional pada tahun 1973, perbedaan pandangan dalam melihat apa itu Negara Islam menjadi faktor utama sulitnya menyatukan PAS-UMNO. PAS dengan tegas menyatakan bahwa negara Islam adalah negara yang berlandaskan pada hukum Islam atau dalam arti lain menetapkan syariat Islam sebagai hukum resmi negara dan menolak segala sesuatu yang bukan berasal dari Islam, bukan hanya sebatas menerapkan nilai-nilai Islam sambil tetap menggunakan hukum-hukum buatan manusia.

Di sisi lain, meski mampu memenangkan suara mayoritas di Kelantan pada tahun 1990 dan menjalankan kekuasaan di Negara bagian tersebut, namun secara keseluruhan, PAS belum mampu mematahkan dominasi UMNO yang telah berkuasa sejak pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955.

Setidaknya, ada tiga faktor yang membuat PAS kesulitan untuk mematahkan dominasi UMNO. *Pertama*, Ideologi Islam yang diusung PAS belum mampu menandingi kuatnya dukungan warga Melayu atas kebijakan Islamisasi UMNO yang mulai dikembangkan pada masa Mahathir Mohammad. Meski pada dasarnya adalah sekuler, UMNO tidak dapat meninggalkan Islam yang telah terintegrasi di dalam kehidupan masyarakat Melayu karena Melayu adalah Islam meski Islam belum tentu Melayu. Menurut Mahathir, kebijakan Islamisasi merupakan penanaman nilai-nilai keislaman dan tidak sama artinya dengan menerapkan hukum Islam di dalam Negara.⁹¹ Dengan kebijakan Islamisasi ini, UMNO terlihat lebih baik daripada PAS.

Kedua, radikalisme yang terjadi di tubuh PAS pada periode awal 1980-an hingga pertengahan 1980-an membuat konstituen Melayu meninggalkan PAS. Pandangan universalisme Islam yang diikuti dengan keinginan untuk mencabut hak istimewa warga Melayu dan memberikan hak yang lebih besar kepada warga non-Melayu justru dianggap mengkhianati kepercayaan warga Melayu yang diberikan kepada PAS. Radikalisme PAS yang terjadi tidaklah memberikan

⁹¹ Choirie, op.cit, hal 172

keuntungan kepada PAS. Sebaliknya, malah justru membuat PAS kehilangan konstituen Melayu.

Ketiga, penerapan hukum hudud yang diberlakukan di Kelantan menimbulkan kontroversi di Malaysia. Kontroversi terjadi pada implementasi hukum hudud yang meliputi enam hal, penerapan hukum hudud yang bertentangan dengan konstitusi federal, status non-muslim di dalam hukum hudud, jumlah saksi yang harus dihadirkan dalam kasus perzinahan, permasalahan pemurtadan, tuduhan fitnah, serta hukuman bagi masalah pencurian.⁹² Pemerintah Malaysia melalui Mahathir Mohammad menolak pelaksanaan hukum hudud di Kelantan dengan mengatakan bahwa Undang-Undang Malaysia sudah sesuai dengan Islam dan menegaskan kembali nilai-nilai pluralisme dan toleransi serta memperingatkan bahaya ekstremisme agama.⁹³

Keberhasilan PAS dalam merebut kembali Kelantan pada tahun 1990 juga lebih disebabkan oleh perpecahan yang terjadi di dalam tubuh UMNO sehingga terbentuk UMNO Baru dan Semangat 46. Koalisi PAS dengan Semangat 46 sangat berperan dalam kemenangan PAS di Kelantan. Tengku Razaleigh Hamzah yang menjadi pemimpin Semangat 46 merupakan tokoh yang berasal dari Kelantan sehingga mampu meraup suara untuk kemenangan Angkatan Perpaduan Ummah (APU), koalisi antara PAS dan Semangat 46. Selain itu, Peranan para *Tok Guru* yang memiliki kedudukan penting di dalam masyarakat pertanian tradisional Kelantan juga sangat efektif dalam kemenangan PAS di Kelantan. Di luar Kelantan, tampaknya masih sangat sulit bagi PAS untuk menggeser posisi UMNO sebagai partai utama etnis Melayu.

PAS membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk dapat menerapkan hukum Islam secara menyeluruh di Malaysia. Kelantan yang menjadi basis PAS harus terus dipertahankan sambil berusaha untuk memperluas pengaruh PAS di Negara bagian lain. PAS membutuhkan koalisi untuk dapat memimpin Malaysia, seperti yang dilakukan pada tahun 1990. PAS juga harus dapat meyakinkan

⁹² Mohammad Hashim Kamali, Punishment in Islamic Law : A Critique of the Hudud Bill in Kelantan, Malaysia, dalam jurnal Arab Law Quarterly, vol 13 no. 3 (1998), hal 1-2

⁹³ Choirie, opcit, hal 176

masyarakat Melayu secara khusus dan Malaysia secara umum bahwa apa yang dicita-citakan PAS adalah hal yang paling baik bagi semua pihak karena hingga saat ini, cita-cita PAS belum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Malaysia. Jika hal-hal di atas tidak dilakukan, tampaknya amat sulit bagi PAS untuk dapat menggeser dominasi UMNO dan menjalankan cita-cita partai untuk menegakkan hukum Islam di Malaysia.



BIBLIOGRAFI

Sumber buku :

- Abdullah, Abdul Rahman Haji. (1997). *Pemikiran Islam Di Malaysia, Sejarah dan Aliran*. Jakarta: Gema Insani Press
- Abdullah, Taufik, dan Sharon Siddique. (1988). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES
- Ayoob, Mohammed. (1982). *The Politics of Islamic Reassertion*. New Delhi: Vikas Publishing House
- Azra, Azyumardi. (1999). *Renaissance Islam Asia Tenggara*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- (1989). *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Choirie, Effendy. (2008). *Islam Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan Diplomasi*. Jakarta: Pensil-324
- Hamid, Ahmad Fauzi Abdul. (2009). 'The New Challenges of Political Islam in Malaysia'. Perth: Murdoch University
- Hoong, Khong Kim. (1991). *Malaysia's General Election 1990: Continuity, Change, and Ethnic Politics*. Singapura: ISEAS
- Ibrahim, Ahmad, Sharon Siddique, dan Yasmin Hussain. (1990). *Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES
- Ismail, Abdul Rahman Haji. (2005). *Malaysia, Sejarah Kenegaraan dan Politik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- Kassim, Ismail. (1978). *The Politics of Accommodation, an Analysis of the 1978 Malaysian General Election*. Singapura: ISEAS
- Mandaville, Peter, Farish A. Noor, Alexander Horstmann, Dietrich Reetz, Ali Riaz, Animesh Roul, Noorhaidi Hasan, Ahmad Fauzi Abdul Hamid, Rommel C. Banlaoi, dan Joseph C. Liow. (2009). *Transnational Islam in South and Southeast Asia: Movement, Networks, and Conflict Dynamics*. Seattle: The National Bureau of Asian Research
- Milne, R.S., dan Diane K. Mauzy. (1986). *Malaysia, Tradition, Modernity, and Islam*. Colorado: Westview Press

Mitsuo, Nakamura, Sharon Siddique, dan Omar Farouk Bajunid. (2001). *Islam and Civil Society in Southeast Asia*. Singapura: ISEAS

Mutalib, Hussin. (1993). *Islam in Malaysia: From Revivalism to Islamic State*. Singapura: Singapore University Press

Ramanathan, Sankaran, dan Moh. Hamdan Adnan. (1988). *Malaysia's General Election, the Urban-Rural Dichotomy*. Singapura: ISEAS

Sumber internet :

Arkib Resmi PAS Pusat. "Sejarah Parti Islam Se-Malaysia (PAS)". <http://www.pas.org.my>. Diakses pada tanggal 19 April 2010, pukul 12.44

PAS Kelantan. "Sejarah 50 Tahun PAS Kelantan". <http://kelantan.pas.org.my>. Diakses pada tanggal 19 April 2010, pukul 12.59

Sumber jurnal:

Bakar, Ibrahim Abu. (2009). 'PAS and Its Islamist Fundamentalism in Malaysia'. *Journal of Human Science* hal 1-41.

Miller, Erica. (2004). 'The Role of Islam in Malaysian Political Practice'. *Al Nakhlah*

Sumber jurnal dari internet:

Bass, Jerry. (1983, Februari). 'Malaysia in 1982: A New Frontier?'. *Asian Survey*, Vol. 23, No. 2, *A Survey of Asia in 1982*: bagian II, hal 191-200. <http://www.jstor.org/stable/2644351>, diakses pada 23 April 2010 pukul 16.00

Funston, N. J. (1976, Maret). 'The Origins of Parti Islam Se Malaysia'. *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 7, No. 1 hal 58-73. <http://www.jstor.org/stable/20070163>, diakses pada 20 Oktober 2009 pukul 09.36

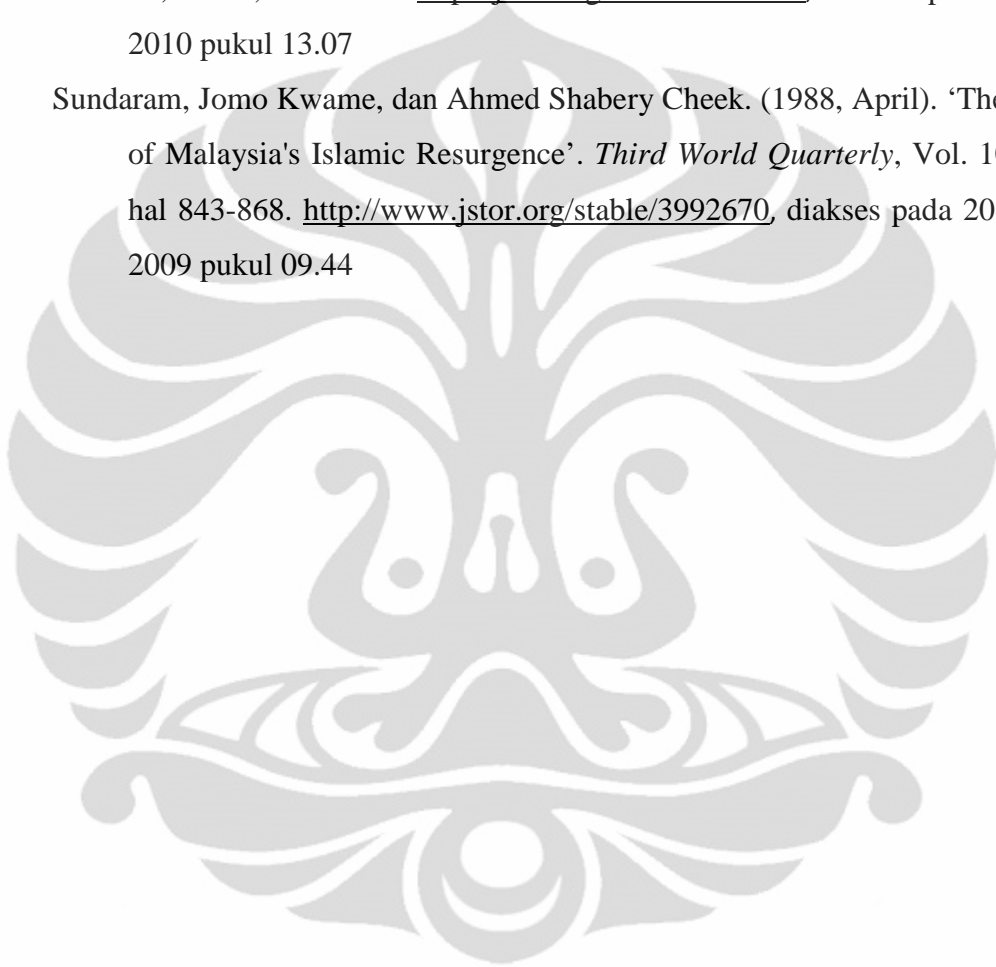
Kershaw, Roger. (1977). 'The 'East Coast' in Malayan Politics: Episodes of Resistance and Integration in Kelantan and Trengganu'. *Modern Asian*

- Studies*, Vol. 11, No. 4, hal 515-541. <http://www.jstor.org/311897>, diakses pada 20 April 2010 pukul 11.27
- Kim, Khoo Kay. (1980, Maret). 'Islam and Politics in Kelantan'. *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 11, No. 1, hal 187-194. <http://www.jstor.org/stable/20070335>, diakses pada 20 Oktober 2009 pukul 09.48
- Liow, Joseph Chin Yong. (2004). 'Exigency or Expediency? Contextualising Political Islam and the PAS Challenge in Malaysian Politics'. *Third World Quarterly*, Vol. 25, No. 2, hal 359-372. <http://www.jstor.org/stable/3993686>, diakses pada 20 April 2010 pukul 16.38
- Mauzy, Diane K. (1979, Maret). 'A Vote for Continuity: The 1978 General Elections in Malaysia'. *Asian Survey*, Vol. 19, No. 3, hal 281-296. <http://www.jstor.org/stable/2643694>, diakses pada 23 April 2010 pukul 17.05
- (1983, April). 'The 1982 General Elections in Malaysia: A Mandate for Change?'. *Asian Survey*, Vol. 23, No. 4, hal 497-517. <http://www.jstor.org/stable/2644235>, diakses pada 21 April 2010 pukul 10.52
- Mehden, Fred R. von der. (1991, Februari). 'Malaysia in 1990: Another Electoral Victory'. *Asian Survey*, Vol. 31, No. 2, *A Survey of Asia in 1990*: bagian II, hal 164-171. <http://www.jstor.org/stable/2644927>, diakses pada 20 April 2010 pukul 11.28
- (1963, Desember). 'Religion and Politics in Malaya'. *Asian Survey*, Vol. 3, No. 12, hal 609-615. <http://www.jstor.org/stable/3023486>, diakses pada 20 April 2010 pukul 16.14
- Ratnam, K.J., dan R. S. Milne. (1970). 'The 1969 Parliamentary Election in West Malaysia'. *Pacific Affairs*, Vol. 43, No. 2 hal 203-226. <http://www.jstor.org/stable/2755064>, diakses pada 21 April 2010 pukul 17.37

Singh, Hari. (1991, Agustus). 'Political Change in Malaysia: The Role of Semangat 46'. *Asian Survey*, Vol. 31, No. 8, hal 712-728. <http://www.jstor.org/stable/2645225>, diakses pada 23 April 2010 pukul 16.01

Smith, T.E. (1960, Maret). 'The Malayan Election of 1959'. *Pacific Affairs*, Vol. 33, No. 1, hal 38-47. <http://jstor.org/stable/2753647>, diakses pada 20 April 2010 pukul 13.07

Sundaram, Jomo Kwame, dan Ahmed Shabery Cheek. (1988, April). 'The Politics of Malaysia's Islamic Resurgence'. *Third World Quarterly*, Vol. 10, No. 2, hal 843-868. <http://www.jstor.org/stable/3992670>, diakses pada 20 Oktober 2009 pukul 09.44



LAMPIRAN

I. Manifesto Pemilu PAS Kelantan pada Pemilu 1969

KELANTAN: PAS MANIFESTO 1969

PAS Kelantan faces the General Election 1969

With Islamic principles we defend the rights of the Malays as one race. On Islamic principles we base our politics, conduct our economy and consolidate the nation.

-Because PAS fights for Islamic politics; the Alliance is the enemy of the Kelantan people.

-Because PAS fights for the rights of the Malay race; the Alliance tyrannizes the Kelantan people.

-To vote for the Alliance is to banish Islam from political questions and national affairs. -To vote for the Alliance is to encourage the rape of the rights of the Malay race.

Vote for 'Moon and Star' to ensure the sovereignty of Islam, the Malay race and our native land.

Sumber : Kershaw, Roger. (1977). *'The 'East Coast' in Malayan Politics: Episodes of Resistance and Integration in Kelantan and Trengganu'*. Modern Asian Studies, Vol. 11, No. 4 (1977), hal 515-541

Dari manifesto diatas, terlihat bahwa PAS mengkampanyekan diri sebagai partai politik kaum Melayu yang memperjuangkan Islam dan memandang bahwa Aliansi adalah musuh dari masyarakat Kelantan. Memilih Aliansi berarti memisahkan Islam dari urusan politik dan kebangsaan serta merampas hak politik kaum Melayu. Artikel ditulis seperti aslinya.

Lampiran II. Pernyataan petinggi PAS tentang kebijakan PAS di Kelantan

“Bismillah irrahman irahim”

“To the whole people of Kelantan, wise electors! Since PAS was given authority by the people of the State of Kelantan we have done our best to put into effect the aspirations of the manifesto which we put out at the last election, but as you all know well, ladies and gentlemen, our opponents have also been active in frustrating our desire to bring about great changes in the State.

Yet however heavy the burden which PAS has had to bear in face of pressure and obstacles, the PAS Administration has still managed to ride out a decade, approximately ten years, or the span of two elections—the election of 1959 and the election of 1964.

This is an extraordinary situation, something that astonishes observers from outside the State. Indeed this is a reason for pride among the people of Kelantan, who are well-known for their original qualities.

The victories or successes which stand out among the events of the past ten years, thanks to the people's support for PAS, are: firstly, land which has been turned into Malay Reservation under the PAS Administration has enjoyed continuous protection and care. Secondly, the people in other States who have kept an eye on developments in Kelantan have been able to make a clear comparison with the ways the Alliance government jeopardizes the Malays and the community of Islam; they are now becoming conscious and aware.

The success achieved up until now is a blessing bestowed by the support of the people of Kelantan who through their courage and fortitude have given hope of victory to PAS in other States in the years ahead. All this shows clearly that the aspirations of the PAS struggle are coming ever nearer to realization.

Because of various kinds of obstruction placed deliberately in our path, and owing also to the inherent obstacles in a Constitution which divides

administrative authority between the State and the Federation, PAS has not been free to give effect to all its aspirations, and this is particularly true in questions relating to the operation of the laws of Islam. All the same, during the 10 years of PAS administration the breath, or spirit, of Islamic government has been successfully infused into the administration of Kelantan. The efficiency of the Kelantan government has been widely acknowledged: Kelantan is one of the most efficient States in its administration, despite the constant financial straits. And Kelantan has also been acknowledged and reported on as one of the States of the Federation where graft, or corruption, happens most rarely.

During the period of PAS government some 200,000 acres have been given to the people in a variety of ways, including the schemes of the State Land Development Board. Indeed were it not for various sorts of obstacles, there is no doubt at all that the total acreage opened would be far higher than that. And it must be understood that without the obstacles placed deliberately in our path, the State of Kelantan would have made much more progress, not least in the opening up of new areas of settlement, to the great benefit of the State and its people generally.

It is planned to open up another 100,000 acres for the people in the five years which lie ahead.

As for other big projects which have been successfully put into operation by our own talent and ingenuity, there is the Sultan Yahya Putera Bridge, which was still in the construction stage at the last election. This bridge project of ours has brought benefit to hundreds of thousands of the people.

Another big PAS project which has succeeded is the formation of a centre of higher Islamic studies at Nilam Puri. This project has attracted attention throughout the Islamic world, because it is not a mere Islamic secondary school but a college or faculty of Islamic law and international law. The initiative of PAS with this faculty will be followed before long by several other faculties, for it is our fondest wish to create an Islamic university which will be an object of pride in the Islamic world and of especial benefit to the

development of Islamic instruction and education in this part of the globe. The launching of such an Islamic university will set alight an intellectual beacon of the community of Islam, and fill a gap in its leadership.

Since PAS has administered Kelantan several joint irrigation projects with the Central Government have been put into operation with success, for the purpose of double-cropping of rice. For example, the Salor irrigation scheme, the Lemal irrigation scheme and, in the preparatory stage at this very moment, the Kemubu irrigation scheme, which has been granted a loan from the World Bank with the full guarantee and cooperation of the PAS government of Kelantan.

With the exception of the school-building programme, many other projects have suffered from the deliberate go-slow tactics of the Central Government, even though the PAS government has extended its fullest cooperation.

The Central Government, under Alliance control, has done this as a devious piece of political bargaining. One example is the rural roads scheme for Kuala Krai/Bukit Hantu which would be of great value to the Kelantan economy and would provide better communications facilities for the whole people of Kelantan. The Alliance, in control at the centre, has simply played political football with this scheme without the slightest hesitation or sense of shame, so that up to the present it remains uncompleted.

In general PAS has fulfilled its responsibility to the people and State of Kelantan throughout its past period of office. If the people of Kelantan give their confidence once again to PAS to be the government of Kelantan, God-willing, PAS will be able to continue to serve the welfare of the whole people and the State. May it be that the State of Kelantan and its people, with their great history in times past, will once more become a paradigm-pioneers in the great struggle that will determine change in the politics of our nation and ensure the supremacy of our race and salvation of our native land for ever, following the guidance and teaching of Islam which PAS has taken as its philosophy and guideline in its political struggle.

Thank you. Wabillah hiltaufik walhidayah.”

Haji Mohamed Nor bin Haji Yusof

PAS commissioner for the State of Kelantan April 1969

Sumber: Kershaw, Roger. (1977). *'The 'East Coast' in Malayan Politics: Episodes of Resistance and Integration in Kelantan and Trengganu'*. Modern Asian Studies, Vol. 11, No. 4 (1977), hal 515-541

Pernyataan di atas yang dikemukakan oleh Mohamed Nor bin Haji Yusof di atas menerangkan tentang kesuksesan yang telah di raih PAS selama 10 tahun memerintah di Kelantan. Beberapa diantaranya adalah keberhasilan PAS untuk memberikan tanah kepada kaum Melayu, penerapan Islam di dalam pemerintahan, efektifitas administrasi pemerintahan Kelantan, serta penurunan tingkat korupsi. Mohamed Nor juga meminta kepada para pemilih Kelantan untuk memberikan suaranya kepada PAS supaya PAS dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kelantan. Tulisan dibuat seperti aslinya.

Lampiran III. Pernyataan Presiden PAS, Yusof Rawa mengenai bentuk Negara Islam versi UMNO.

“I don’t think I need to add more than what had already been common knowledge about our party’s view on Islam and the Islamic state. Since our formation more than 30 years ago, PAS has not changed substantially on these matters. It’s true that over the years our party leadership has made some issues more important over others such as the policies adopted by Dr. Burhanuddin and Datok Asri, my predecessors. But we are still committed to our declared objective of calling for the Islamisation of the society and the establishment of the Islamic state for this country. So, I hope people are clear about our position.

I may add here that since the coming of a new leadership under me, we are even more determined than ever before to pursue such goals. We do not accept UMNO and the government’s version of Islam, an Islam which does not, in total, subscribe to the precepts of the Qur’an and the Sunnah. After so many years of rule, UMNO and the Barisan have not eradicated poverty in the country. Laws such as the Internal Security Act and the Printing Presses Act are oppressive and if UMNO believe in freedom of expression and justice as enjoined in Islam, then such laws must be abolished.

UMNO’s Islam has been piecemeal in approach or meant for political purposes, to win Malay votes. UMNO does not actually subscribe to true Islam. Look at the many vices in our society- drinking, prostitution, free mixing of sexes, and other moral laxities- these continue unabated because the government’s commitment to the faith has always been politically-motivated. We in PAS also require votes and support from the people, but even if we continue to lose elections, we will not stop talking about Islam because securing political office is secondary to our final objective, which is, to seek Allah’s reward and to obey His commandments.

The solution to the many problems in this country today lie in the creation of an Islamic state. Statements have been made by UMNO leaders from time to time as if telling the people and the Rulers that in an Islamic state everything will be ruled equally and thus, everyone, including the Rulers, cannot enjoy the many

privileges they are now enjoying. In a way this is true but the real motive for such statements is really to frighten Malays, and the Sultans, about what an Islamic state means to them, so that they will object to its formation.

What will exist in an Islamic state is clear. There is going to be an elected parliament but all legislations will have to be scrutinized by the Ulama Council. If UMNO's Islam is true, why are they afraid of being scrutinised by the Ulama? The goals of the Islamic state, and our party's goals, are clearly spelt out in our Constitution, Article 5 (1) which stipulated that our final objective is to realize Islamic values and teachings in our daily lives. Not merely in rituals, but all the country's social, economic, and political systems must tailor to Islamic values. Is this a realistic and serious faith and we view this world and life from realistic perspective. By this I mean that God made this world and people with a clear and deliberate motive- to observe God's orders, and live as Muslims. In our Constitution, it is clear that we accept such orders.

We in PAS have been accused for having only general ideas about the structures and functions of an Islamic state whose establishment we call for. Let people continue to say those things. To us, it is not practical to go into details of what we want to do in an Islamic state. If they want to see we operate it well, they must elect us. They owe God something if their vote deprived us to govern the Islamic state. All operational aspects of how and when to do certain things or launch certain policies, can be taken up later when we do have the Islamic state. It's not true for some to say that PAS' view of Islam and the Islamic state is only relevant to backward people and those in the villages only, and that our support comes only from the poor in the rural areas. To say this is not only to insult us but to insult Islam because the faith originated and later blossomed in and not in urban setting, not a rural one; in the thriving city of Mecca and not in the outback desert areas only lived by camels and some 'bedouins'.

Are they saying that the people of Kelantan and Trengganu, especially Kelantan, who have voted us for many years since 1959, are rural people with a rural mind? Now, Alhamdulillah, with the coming of new ulama leaders into our party, more and more people, both in Kelantan and the other urban areas, are showing their

support for us, although we have not done as well in UMNO. What matters most to us is that we continue the struggle, and whether we win elections or not, we continue the struggle. We believe one day, God will reward us with the Islamic state. Because of our belief in our principles and in our ultimate objective, we have opened our arms to non Malays too. The result has not been too good but with the commitment of our new leaders, we will continue. Insha Allah our struggle as far as we can go. We know of so many people who, when they meet us, indicate their support for us and our objectives, but are not prepared to go all out now to openly support us. We understand their position and we hope more will be forthcoming to stand for us openly about making this country an Islamic State.

The Islamic state has yet to be fully understood. That's why so many non-Muslims get increasingly fearful of such a state whenever we raise this issue. This happens because of their ignorance, but the more they know about the Islamic state, believe me, the more they are surprised at the many good things they will get or are entitled to. The government also tries its best to discredit us. Never mind, in the end, UMNO is not the final judge, only God is."

Yusof Rawa
(former President of PAS)

Sumber : hussin Muthalib. 1993. Islam in Malaysia, from Revivalism to Islamic State. Singapura: Singapore university Press

Tulisan di atas merupakan pernyataan dari Yusof Rawa, mantan Presiden PAS. Yusof Rawa menyatakan bahwa PAS menolak bentuk Negara Islam versi UMNO sambil menegaskan tujuan islamisasi kebijakan UMNO hanyalah untuk memenangkan suara pemilih Melayu, bukan untuk menerapkan Islam yang sebenarnya. Yusof Rawa juga menolak pandangan yang mengatakan Islam versi PAS hanya cocok untuk orang-orang terbelakang dan yang tinggal di pedesaan dan menunjukkan peningkatan suara PAS di daerah perkotaan. Pada akhirnya,

Yusof Rawa mengatakan bahwa, menang ataupun kalah dalam pemilu, PAS akan tetap memperjuangkan Islam, seberapa besarpun keinginan UMNO untuk menjatuhkan PAS karena pada akhirnya, keputusan akhir bukan pada UMNO, melainkan pada Allah. Tulisan dibuat sesuai aslinya.



Lampiran V. bendera Negara Bagian Kelantan Darul Naim



Keterangan: Warna merah melambangkan kejujuran rakyat. Sedangkan warna putih melambangkan kesucian Sultan Kelantan.

Sumber: <http://redzuan-tumin.blogspot.com/2009/02/bendera-kelantan.html>, diakses pada 17 Juni 2011, pukul 09.15

Lampiran VI. Lambang PAS



Sumber: www.malaysiaparty.blogspot.com, diakses pada 17 Juni 2011 pukul 09.18

Lampiran VII. Foto suasana Pemilu 1969



Sumber: www.redzuan-tumin.blogspot.com, diakses pada 17 Juni 2011, pukul 09.20

Lampiran VIII. Foto suasana Kuala Lumpur saat kerusuhan etnis 1969



Sumber: www.smalland.wordpress.com, diakses pada 17 Juni 2011, pukul 09.25

Lampiran IX. Foto korban kerusuhan etnis 1969



Keterangan: korban-korban peristiwa kerusuhan etnis yang belum sempat dievakuasi.

Sumber: www.immunk.com, diakses pada 17 Juni 2011, pukul 09.32

Lampiran X. Foto jalanan Kuala Lumpur saat kerusuhan etnis 1969



Keterangan: tampak suasana jalan yang dipadati kendaraan. Kemacetan terjadi untuk menghindari kerusuhan etnis 13 Mei 1969.

Sumber: www.ms.wikipedia.org, diakses pada 17 Juni 2011 pukul 09.36

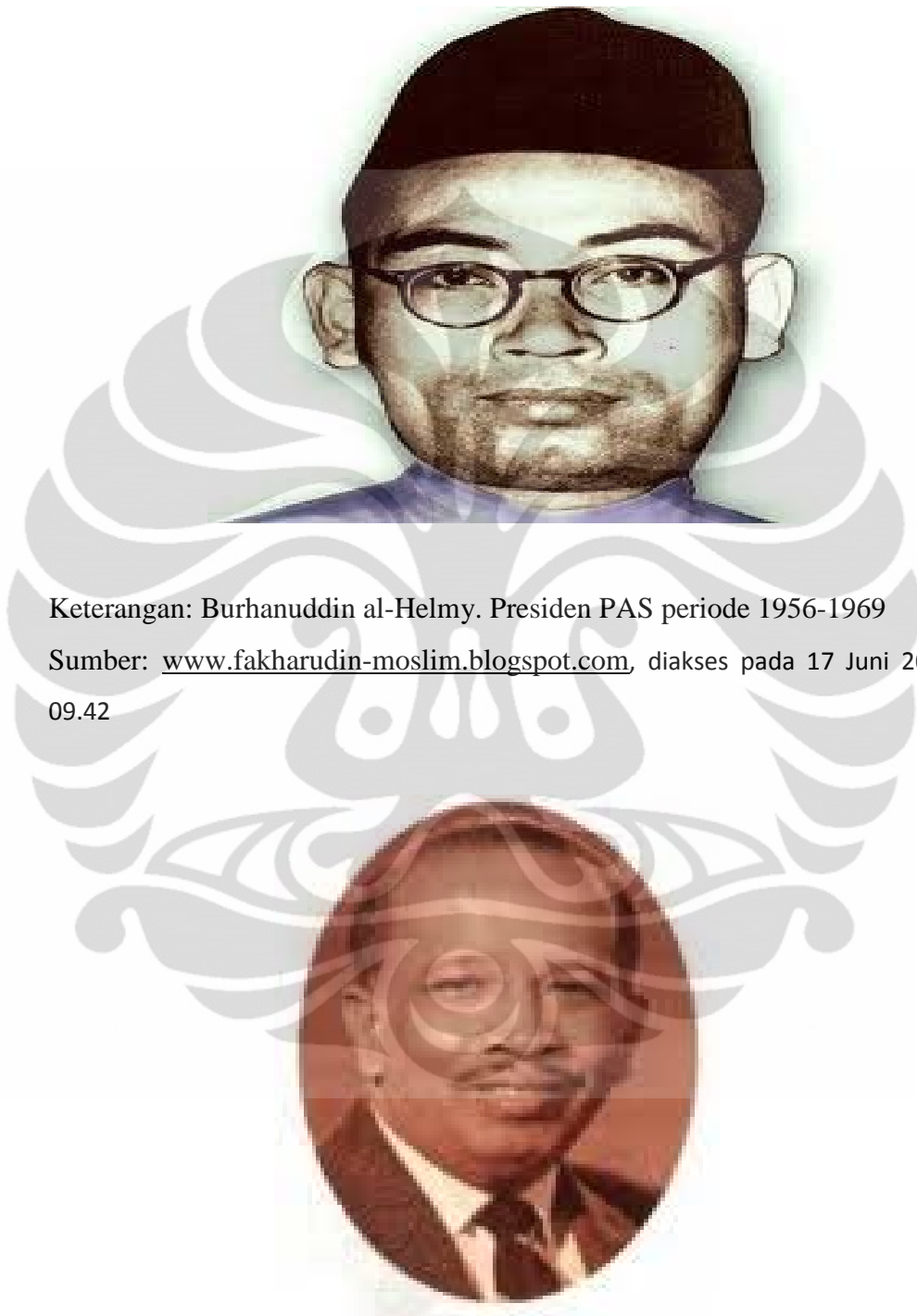
Lampiran XI. Foto suasana Kelantan saat Krisis Kelantan 1978



Keterangan: demonstrasi masyarakat Kelantan yang menuntut tetap berkuasanya Mohammad Nasir sebagai Menteri Besar Kelantan. Demonstrasi terjadi pada akhir tahun 1977.

Sumber: www.towardsmardhatillah.wordpress.com, diakses pada 17 Juni 2011, pukul 09.40

Lampiran XII. Foto para pemimpin PAS



Keterangan: Burhanuddin al-Helmy. Presiden PAS periode 1956-1969

Sumber: www.fakharudin-moslim.blogspot.com, diakses pada 17 Juni 2011 pukul 09.42

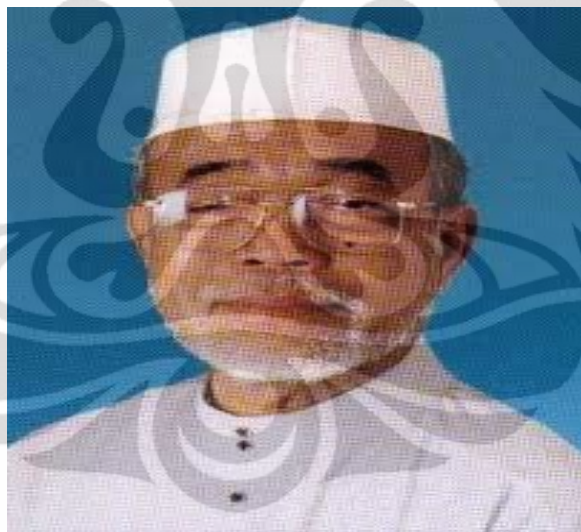
Keterangan: Mohammad Asri bin Haji Muda. Presiden PAS periode 1969-1983

Sumber: www.ms.wikipedia.org, di akses pada 17 Juni 2011 pukul 09.44



Keterangan: Yusof Rawa. Presiden PAS periode 1983-1989

Sumber: www.permatangbendang.blogspot.com, diakses pada 17 Juni 2011 pukul 09.46



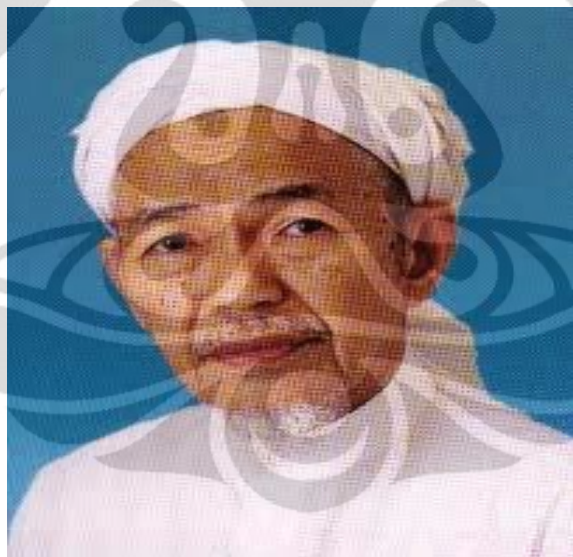
Keterangan: Fadzil Mohammad Noor. Presiden PAS periode 1989-2002

Sumber: www.anwaribrahimblog.com, diakses pada 17 Juni 2011 pukul 09.48



Keterangan: Abdul Hadi Awang. Presiden PAS periode 2002-sekarang

Sumber: www.pantheraleo1982.wordpress.com, diakses pada 17 Juni 2011 pukul 09.50



Keterangan: Nik Abdul Aziz Nik Mat. Mursyid 'Am (pemimpin tertinggi) PAS

Sumber: www.pantheraleo1982.wordpress.com, diakses pada 17 Juni 2011 pukul 09.53